

PAPER NAME

Skripsi_DIDIK KURNIAWAN_RPL_for turnitin.pdf

AUTHOR

Didik Kurniawan

WORD COUNT

21592 Words

CHARACTER COUNT

141429 Characters

PAGE COUNT

93 Pages

FILE SIZE

1.1MB

SUBMISSION DATE

Aug 1, 2024 8:32 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 1, 2024 8:33 AM GMT+7

● 35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 35% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Crossref Posted Content database
- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)



**PERAN TEKNOLOGI FINANSIAL, LITERASI FINANSIAL DAN INKLUSI
FINANSIAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH MELALUI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
BONDOWOSO**

PROPOSAL

Oleh

Didik Kurniawan

NPM : 202213261

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah memegang peran vital dalam memastikan keberlangsungan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang kompleks, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi, dan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan yang relevan. Perencanaan keuangan daerah merupakan tahap awal yang krusial dalam menentukan arah dan alokasi sumber daya keuangan. Hal ini melibatkan penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tujuan pembangunan jangka panjang daerah tersebut. Perencanaan yang matang tidak hanya memperhitungkan aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Studi oleh Thießen (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas keputusan.

Proses perencanaan keuangan daerah merupakan fondasi dari pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam tahap ini, pemerintah daerah merumuskan prioritas pembangunan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah. Anggaran yang disusun harus mencerminkan alokasi yang rasional dan proporsional terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan telah diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan warga.

Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah pengadaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, termasuk pajak, dana perimbangan, dan pinjaman. Namun, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pendanaan yang diperoleh tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan dan tidak mengorbankan stabilitas keuangan di masa mendatang. Studi oleh De Mello (2017) menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi risiko keuangan daerah. Setelah anggaran disusun, pemerintah daerah perlu mencari sumber

pendanaan untuk mengimplementasikan rencana pembangunan yang telah dirumuskan. Sumber pendanaan dapat berasal dari pajak, dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta pinjaman dan obligasi. Diversifikasi sumber pendanaan merupakan strategi yang disarankan untuk mengurangi risiko keuangan daerah dan memastikan ketersediaan dana yang memadai.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap di mana alokasi sumber daya keuangan direalisasikan. Pada tahap ini, pengeluaran untuk berbagai program dan proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam anggaran. Manajemen yang efisien dan transparan dalam penggunaan dana publik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian oleh Shah (2019) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam manajemen keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Pengawasan dan pengendalian merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini melibatkan audit internal dan eksternal, evaluasi kinerja, serta mekanisme pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi. Penelitian oleh Akampumuza et al. (2020) menekankan perlunya keterlibatan lembaga independen dalam proses pengawasan untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Pelaporan dan evaluasi merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk secara berkala melaporkan kinerja keuangan dan pencapaian program kepada pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan masyarakat umum. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dana publik serta untuk memperbaiki kelemahan dan melakukan penyesuaian di masa mendatang. Melalui proses pelaporan dan evaluasi yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Patterson & Van Belle, 2019).

Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak daerah yang terbukti meningkatkan nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian tersebut,³² pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah. Pendapatan daerah juga berperan dalam pelaksanaan rencana pemerintah daerah dengan tujuan memperluas pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi pendapatan awal daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan sinergi antara semua tahapan di atas, serta keterlibatan yang aktif dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Dengan pengelolaan anggaran belanja daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Setyawan, 2023: 20). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki manajemen anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Peningkatan penggunaan belanja daerah terhadap belanja modal dalam bentuk aset tetap dapat meningkatkan produktivitas perekonomian suatu daerah. Lebih lanjut Setiawan, (2023; 20) menjelaskan bahwa¹⁹ semakin tinggi nilai belanja daerah yang digunakan dalam pembangunan, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk serta penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan penggunaan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

²⁰ Suatu daerah perlu maksimal dalam menghasilkan dan memanfaatkan peluang daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, seringkali terjadi lemahnya kapasitas pemerintah Kota dalam membuat prakiraan

pendapatan asli daerah yang akurat, menghambat pengumpulan dana seefektif mungkin. Dengan dukungan Undang-Undang No. 33/2004, peluang keuangan daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan PAD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan outsourcing yang lebih konstruktif. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda, tergantung pada sumber daya alam dan kapasitas industri. Secara umum, daerah dengan sumber daya alam atau kapasitas industri yang besar memiliki PAD yang lebih tinggi, menyebabkan ketimpangan pendapatan daerah (Rahman, Z., & Sumarni, S. 2024: 1183).

Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Melisa, (2019) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang penting untuk diadopsi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan adalah dengan meningkatkan pengetahuan keuangan melalui literasi keuangan. Hal ini penting dilakukan karena dengan adanya kemampuan literasi keuangan yang memadai, maka keuangan yang diciptakan akan menuju ke arah pengembangan yang baik dari waktu ke waktu, sehingga pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor yang perlu diperhitungkan adalah *financial technology*, seperti yang diadopsi oleh Penelitian Sari, (2022) mengungkapkan jika literasi keuangan dan *financial technology* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Marelan.

Penelitian Rahayu. (2023) memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah 34 Provinsi di Indonesia Periode 2020-2022. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah *financial technology* sebagai variabel independen, sedangkan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu besarnya pengaruh *financial technology* terhadap pendapatan asli daerah sebesar 91,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan melalui literasi keuangan dan penggunaan *financial technology* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD di 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD menjadi sumber pendanaan utama bagi daerah dalam melaksanakan otonomi. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini memberikan daerah otonomi yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal yang dibutuhkan untuk berhasil mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD mendefinisikan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin besar kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kewajiban pembangunan daerah.

Kebutuhan untuk meningkatkan ⁴ Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya lembaga pemerintah yang dilimpahkan ke daerah, sehingga banyak personel, peralatan, dana, dan material yang ditransfer ke daerah. Sementara itu, selama ini dana perimbangan merupakan sumber keuangan yang disalurkan Pemerintah ke daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Meski jumlahnya relatif memadai, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus mampu memanfaatkan potensi sumber PAD semaksimal mungkin, namun tentunya harus tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan daerah. Pengelolaan mengenai keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pasal 2 ayat 2 yang meliputi kewenangan pengelolaan keuangan daerah, prinsip umum dan struktur Anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan APBD, penetapan APBD, pembuatan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pemantauan pengelolaan keuangan daerah

dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dengan perencanaan atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian diatur dalam peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan pemerintah dan kemampuan memperoleh modal dari pendapatan asli daerah. Dalam menyusun APBD kita harus mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berada di sebelah timur Pulau Jawa. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² dan secara geografis terletak antara garis bujur 113°48'10" - ³³113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 °C – 25,10 °C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur terdapat kaki Pegunungan Hyang, dan di sebelah barat terdapat puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing, dan Gunung Kilap. Di utara terdapat Gunung Biser, Gunung Alas Sereh dan Gunung Bendusa.

Kabupaten Bondowoso sebagai suatu wilayah administratif di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola keuangan daerah, terutama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Transformasi teknologi finansial telah membawa perubahan mendalam dalam cara transaksi dan pengelolaan keuangan dilakukan, menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

¹¹ Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso. Anggaran yang dipakai dalam pembangunan daerah yaitu APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sumber pendapatan APBD sendiri telah tertera pada UU No.32 tahun 2004 pasal 157 dimana bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan PAD yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 20 triliun lebih. Setelah itu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu besar yaitu tetap berada pada kisaran Rp. 20 triliun. Sementara, pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai angka Rp. 1,8 triliun.

Penting untuk dicatat bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dana yang terkumpul dari PAD dan sumber-sumber pendapatan lainnya digunakan untuk mendanai program-program pembangunan dan kegiatan operasional pemerintah daerah. Dalam konteks ini, transformasi teknologi finansial dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan teknologi finansial, seperti sistem pembayaran digital atau aplikasi pengelolaan keuangan, dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, mengelola anggaran dengan lebih efisien, dan mengurangi biaya administrasi. Dengan demikian, Kabupaten Bondowoso dan pemerintah daerah lainnya perlu mengadopsi strategi baru dalam mengelola keuangan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi finansial, untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2023. Sehingga dibutuhkan kajian mengenai peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang memiliki peranan

penting dalam peningkatan PAD seperti Teknologi finansial, literasi finansial dan inklusi finansial serta efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel perantara. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti mengambil judul dalam penelitian ini “Peran Teknologi Finansial, Literasi Finansial Dan Inklusi Finansial Terhadap Peningkatan PAD Melalui Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bondowoso”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah:

1. Apakah Teknologi finansial berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso?
2. Apakah Literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah Inklusi finansial berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso?
4. Apakah Teknologi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso?
5. Apakah Literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso?
6. Apakah Inklusi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso?
7. Apakah Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso?
8. Apakah Teknologi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD Melalui Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso?
9. Apakah Literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD Melalui Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso?
10. Apakah Inklusi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD Melalui Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusaan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh :

1. Teknologi finansial terhadap Efektifitas Pengelolaan keuangan;
2. Literasi finansial terhadap Efektifitas pengelolaan keuangan;
3. Inklusi finansial terhadap Efektifitas pengelolaan keuangan;
4. Teknologi finansial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. Literasi finansial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
6. Inklusi finansial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
7. Efektifitas pengelolaan keuangan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
8. Teknologi finansial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Melalui Efektifitas pengelolaan keuangan;
9. Literasi finansial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Efektifitas pengelolaan keuangan;
10. Inklusi finansial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Efektifitas pengelolaan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti Teknologi finansial, literasi finansial dan inklusi finansial terhadap peningkatan PAD melalui efektifitas pengelolaan keuangan daerah Di Kabupaten Bondowoso.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Teknologi finansial, literasi finansial dan inklusi finansial terhadap

peningkatan PAD melalui efektifitas pengelolaan keuangan daerah Di Kabupaten Bondowoso. Serta sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini dapat berguna sebagai sebuah referensi mengenai *financial technology* dan *financial literacy* sehingga pemerintah dapat memanfaatkan mengembangkan regulasi dan aplikasi sebagai pendukung dalam peningkatan PAD serta efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada temuan-temuan sebelumnya sebagai landasan perbandingan dan analisis. Dalam merumuskan hipotesis, studi sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sari (2022) Pengaruh Literasi Keuangan Dan *Financial Technology* Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Di Marelان. Maksud⁴ dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh literasi keuangan dan *financial technology* pada pengelolaan keuangan pelaku UMKM di Marelان baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di kecamatan Medan Marelان. Sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling berjumlah 50 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan penyebaran angket. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan uji hipotesis (uji t dan uji F), dan koefisien determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistic Package For the Social Sciens*) versi 24.00. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa literasi keuangan dan *financial technology* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Marelان.
2. Melisa (2019) Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang⁷. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian¹⁴ ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan cendana kabupaten enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 orang dengan menggunakan metode sapling jenuh yaitu sampel yang mewakili jumlah

populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap efektifitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya kemampuan literasi keuangan yang memadai, maka keuangan yang diciptakan akan menuju ke arah pengembangan yang baik dari waktu ke waktu, sehingga pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang

3. Rozalinda (2023) Pengaruh Inklusi Keuangan, *Financial Technology* dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Pedesaan Di Madura. Jimek: Jurnal ilmiah mahasiswa Ekonomi. Volume 06 nomor 2 tahun 2023 : Hal 229 – 238. ²⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan, financial technology dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM Pedesaan di Madura. Populasi dari studi ini yaitu pelaku UMKM pedesaan di Madura. Dalam pengambilan responden berjumlah 100 orang yang ditujukan kepada pelaku UMKM dengan menyebarkan kuisioner, studi ini menggunakan metode purpose sampling dalam penentuan sampel. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya pengaruh inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan pada kinerja UMKM, tetapi *financial technology* tidak berpengaruh pada kinerja UMKM.
4. Rahayu (2023) Pengaruh *Financial Technology* terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2020-2022. Bandung Conference Series: Economics Studies. Vol. 3 No. 2 (2023) : 515 -521. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan *financial technology* dan pendapatan asli daerah, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi di Indonesia periode 2020-2022. ³⁶ Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah *financial technology* sebagai variabel independen, sedangkan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi di Indonesia periode 2020-2022 yang berjumlah 34 perusahaan. Teknik penentuan ⁴² sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik sampling

jenuh. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu besarnya pengaruh *financial technology* terhadap pendapatan asli daerah sebesar 91,1%.

5. Sari (2020) Pengaruh *Financial Literacy*, Financial Attitude Dan Pendapatan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku Umkm Fashion Di Kota Batu. e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN. eJrm Vol. 09 No. 05 Agustus 2020: 17-31. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara simultan dan parsial antara pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM fashion di kota Batu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM fashion di kota Batu yang berjumlah 468 pelaku usaha. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 50 pelaku usaha, dengan teknik pengambilan sampel dengan menyebarkan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji simultan (uji F), uji parsial (uji t) dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel literasi keuangan, sikap keuangan dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sedangkan secara parsial menunjukkan literasi keuangan (X1) dan pendapatan (X3) berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan (Y), sedangkan sikap keuangan (X2) tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan
6. Nahdia (2021) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Balangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Vol 9, No 2. ¹³Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab rendahnya indeks kemandirian fiskal Kabupaten Balangan, oleh karena itu diperlukan evaluasi kinerja dan penyusunan strategi-strategi untuk

meningkatkan PAD. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data menggunakan analisis rasio efektivitas PAD dan efisiensi PAD serta analisis data model interaktif Miles & Hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 adalah efektif dan efisien, serta strategi utama peningkatan PAD yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah.

7. Noni (2022) Efektivitas Pengelolaan Sistem Keuangan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Yogyakarta. Pustaka Egaliter. ⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Koto Panjang telah menerapkan penyusunan laporan keuangan dan untuk mengetahui apakah pelaku usaha telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya penyusunan laporan keuangan agar pelaku usaha yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan dapat menerapkannya dalam menjalankan usaha, karena dengan adanya penyusunan laporan keuangan dapat membantu usaha yang dijalankan agar terus maju dan berkembang. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan laporan keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Koto Panjang masih terbilang minus dan bisa dikatakan belum layak dan diperlukan adanya edukasi dan tutor tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam peningkatan pendapatan serta adanya transparansi dan juga pemisahan hasil usaha dengan uang pribadi. Maka melalui penulisan ini penulis mengarahkan kepada para pelaku usaha untuk menerapkan teori kebutuhan usaha, selain itu juga membantu proses

penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

8. Pribadi (2023)² Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, [S.l.], v. 2, n. 10, p. 2274-2290, oct. 2023. ISSN 2964-898X. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi dan teknologi informasi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola properti kategori PNS pada Dinas Kesehatan dan 25 Puskesmas di Kabupaten Bondowoso. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan sampling jenuh. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model – Partial Least Square (PLS-SEM). Hasil uji hipotesis pengaruh langsung dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 4.0 menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap sistem informasi akuntansi; Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap sistem informasi akuntansi; Pengetahuan Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen BMD; Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan BMD; Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen BMD; Pengetahuan akuntansi pada Manajemen BMD melalui sistem informasi akuntansi berpengaruh positif namun tidak signifikan; Teknologi informasi terhadap pengelolaan BMD melalui sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Saat Ini

No	Nama dan Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil	Rujukan Hipotesis
1	Sari (2022) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Dan <i>Financial Technology</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku Umkm Di Marelan	Persamaan : variabel literasi keuangan dan <i>financial technology</i> serta pengelolaan keuangan Perbedaan : Permasalahan penelitian dan objek penelitian	literasi keuangan dan <i>financial technology</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Marelan.	H ₁ , H ₂
2	Melisa (2019) Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.	Persamaan : variabel literasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan Perbedaan : Karakteristik objek penelitian yakni berkaitan dengan pengelolaan dana desa	terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.	H ₂
3	Rozalinda (2023) Pengaruh Inklusi Keuangan, <i>Financial Technology</i> dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Pedesaan Di Madura.	Persamaan : variabel inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan Perbedaan : Mengukur kinerja keuangan UMKM	bahwa adanya pengaruh inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan padakerja UMKM, tetapi <i>financial technology</i> tidak berpengaruh pada kinerja UMKM.	H ₁ , H ₃
4	Rahayu (2023) Pengaruh <i>Financial Technology</i> terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2020-2022.	Persamaan : variabel <i>financial technology</i> dan Pendapatan Asli Daerah Perbedaan : Periode penelitian dan objek penelitian Jenis data yang digunakan	<i>financial technology</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu besarnya pengaruh <i>financial technology</i> terhadap pendapatan asli daerah sebesar 91,1%.	H ₄
5	Sari (2020) Pengaruh <i>Financial Literacy</i> , <i>Financial Attitude</i> Dan Pendapatan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku Umkm	Persamaan : variabel inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan Perbedaan : Mengukur kinerja keuangan UMKM	terdapat pengaruh secara simultan antara variabel literasi keuangan, sikap keuangan dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sedangkan	H ₂

Tabel 1 dilanjutkan

Lanjutan Tabel 1

No	Nama dan Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil	Rujukan Hipotesis
	Fashion Di Kota Batu		secara parsial menunjukkan literasi keuangan (X1) dan pendapatan (X3) berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan (Y), sedangkan sikap keuangan (X2) tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan	
6	Nahdia (2021) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Balangan	Persamaan : variabel <i>financial technology</i> dan Pendapatan Asli Daerah Perbedaan : Periode penelitian dan objek penelitian Jenis data yang digunakan	efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 adalah efektif dan efisien, serta strategi utama peningkatan PAD yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah	H ₄
7	Noni (2022) Efektivitas Pengelolaan Sistem Keuangan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Persamaan : variabel inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan Perbedaan : Mengukur kinerja keuangan UMKM	penerapan laporan keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Koto Panjang masih terbilang minus dan bisa dikatakan belum layak dan diperlukan adanya edukasi dan tutor tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam peningkatan pendapatan serta adanya transparansi dan juga pemisahan hasil usaha dengan uang pribadi.	H ₇
8	Pribadi (2023) Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Barang	Persamaan : variabel Literasi keuangan dan teknologi keuangan Perbedaan :	Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap sistem informasi akuntansi; Pengetahuan Akuntansi	H ₁ , H ₂

Tabel 1 dilanjutkan

Lanjutan Tabel 1

No	Nama dan Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil	Rujukan Hipotesis
	Milik Daerah Dengan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso).	Pengelolaan Barang Milik daerah	berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen BMD; Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan BMD; Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen BMD; Pengetahuan akuntansi pada Manajemen BMD melalui sistem informasi akuntansi berpengaruh positif namun tidak signifikan; Teknologi informasi terhadap pengelolaan BMD melalui sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan.	
9	Kurniawan (2024) Peran Teknologi Finansial, Literasi Finansial Dan Inklusi Finansial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bondowoso	<p>Persamaan :</p> <p>Variabel Teknologi Finansial, Literasi Finansial, Inklusi Finansial dan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Perbedaan : -</p>	Teknologi finansial berpengaruh positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Literasi finansial berpengaruh positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Inklusi finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Teknologi finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD, Literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD, Inklusi finansial	H ₁ , H ₂ , H ₃ , H ₄ , H ₅ , H ₆ , H ₇

Tabel 1 dilanjutkan

Lanjutan Tabel 1

			berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD.	
--	--	--	---	--

B. Landasan Teori

1. ²²Manajemen Keuangan

a. **Pengertian Manajemen Keuangan**

Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari.

⁶Menurut Musthafa (2017:3) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan mengemukakan bahwa: “Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan”. Pengertian Manajemen Keuangan menurut Farah Margaretha (2014:2) adalah “Proses pengambilan keputusan tentang asset, pembiayaan dari asset tersebut, dan pendistribusian dari seluruh cash flow yang potensial yang dihasilkan dari asset tadi”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015:2), mengemukakan bahwa: “Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer

keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.”.

b. ⁶ Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Dadang Prasetyo Jatmiko (2017:32) bahwa tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan. Sementara menurut Hery (2017:5) berpendapat bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Sedangkan menurut Musthafa (2017:5) bahwa tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendekatan keuntungan dan risiko yaitu manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal.
- 2) Pendekatan Likuiditas Profitabilitas yaitu menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka Panjang.

Pendapat lain dikemukakan oleh menurut Kariyoto (2018:33) menyatakan bahwa tujuan manajer keuangan untuk memaksimumkan *welfare* pemilik saham dengan mengoptimalkan value sekarang atau present value semua laba pemilik saham yang diinginkan akan didapat di masa datang.

2. Teknologi Finansial

a. Pengertian Teknologi Finansial

³⁰ Teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan dan telah merupakan bagian dari proses kegiatan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, perkembangan teknologi informasi berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, baik individu maupun organisasi. Teknologi informasi dibidang keuangan di gunakan untuk membantu masyarakat mengakses produk dan layanan keuangan inovasi dibidang teknologi informasi memberikan peluang bagi kita melakukan kegiatan keuangan dimanapun, kapanpun, mudah dan aman. Wiyono & Kirana (2020:69) menyatakan "Inovasi teknologi informasi dibidang layanan jasa

keuangan adalah *Financial technology* yang memiliki arti inovasi dalam memberikan layanan keuangan".

Nurrohyani & Sihaloha (2020:12-25) mengemukakan²⁵ bahwa "*Financial technology* atau dikenal dengan sebutan fintech merupakan penggantian uang tunai menjadi non tunai dengan menggunakan aplikasi. Layanan fintech bisa digunakan ketika sudah tersambung dengan internet yang di akses melalui smartphone, sehingga penggunaannya menjadi mudah dan cepat".² Gunawan (2018:44) mengatakan bahwa "*Kehadiran financial technology* untuk membantu proses dari jual beli tersebut agar dapat bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan adanya *financial technology*, misalnya, cara pembayaran bisa menjadi lebih mudah karena *financial technology* terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru guna melayani perusahaan pada umumnya dan para individu, khususnya".

Bank Indonesia juga mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya fintech terjadi karena munculnya perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh para penggunaan teknologi informasi tuntunan hidup yang serba cepat. Dengan kehadirannya fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran terkait pencarian barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk melakukan transaksi dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dalam kata lain fintech membantu persoalan transaksi jual beli dan sistem pembayaran jauh lebih mudah, efisien, dan ekonomis tanpa menghilangkan keefektifan.

b. Fungsi Teknologi Finansial

⁴ Menurut Rahma (2018:648) fungsi fintech dapat dibagi menjadi :

- 1) Sistem pembayaran. Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dan mobile payment.
- 2) Pendukung pasar, bahwa teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian

informasi yang lebih cepat atau lebih murah terkait dengan produk atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

- 3) Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko, kategori manajemen investasi dan manajemen resiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
- 4) Pinjaman (lending), Pembiayaan (financing atau funding), dan Penyediaan modal (capital raising), kategori tersebut antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding).

c. Jenis-jenis Teknologi Finansial

Menurut Siregar (2016:48) menyatakan bahwa ⁷ jenis-jenis *Financial technology* secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

- 1) *Payment Channel/System* merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan e-money. Disamping itu, terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*Blockchain*) seperti Bitcoin.
- 2) *Digital Banking* merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti *ATM, EDC, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Phone Banking, dan Video Banking*. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*Branchless Banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

- 3) *Online/Digital Insurance* adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui Website atau Mobile Application,
- 4) *P2P Lending Peer to Peer (P2P) Lending* adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan Website.
- 5) *Crowdfunding* adalah kegiatan pengumpulan dana melalui Website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

d. Indikator *Financial Technology*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hutabarat (2018:55) dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk teknologi finansial yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang *Financial Technology*
Mengukur pengetahuan tentang *Financial technology*.
- 2) Kemudahan
Memberikan kemudahan bagi konsumen dan produsen untuk mendapatkan layanan dan pelayanan yang lebih baik dalam melakukan transaksi.
- 3) Efektivitas
Memberikan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam menggunakan *financial technology* untuk kehidupan sehari-hari.
- 4) Minat
Mengukur minat masyarakat dan/atau mahasiswa menggunakan *financial technology* terhadap pembelian atau penggunaan jasa dan barang.

3. Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

Tohani (2018:51) mengatakan bahwa "Literasi keuangan (*financial literacy*) sebagai bagian literasi ekonomi yang menjadi penting untuk dikembangkan melalui aktivitas pendidikan". Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Lusardi & Mitchell (2007: 205-224) menyatakan bahwa ²⁶ Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan menjadi jalan keluar dari beragam masalah, termasuk mengurangi angka kemiskinan. Semakin tinggi literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan". Hal ini akan mengacu pada keadaan dari keuangan masyarakat, yang mana dilihat dari berapapun penghasilan yang didapat oleh masyarakat, apabila mampu dalam mengalokasikan keuangannya pada lembaga-lembaga yang benar maka akan mengurangi terjadinya resiko-resiko keuangan seperti penggunaan dan tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun hilangnya dana baik yang terjadi secara kesengajaan maupun tidak.

Hernovinsah, dkk (2020:152) mengemukakan bahwa "Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan dan membuat keputusan yang efektif terhadap manajemen penggunaan uang". Mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi akan membuat pencatatan penggunaan keuangan mereka untuk digunakan keperluan yang dibutuhkan, dengan begitu keuangan menjadi tercatat pengeluarannya. Otoritas Jasa Keuangan (2013) mengemukakan bahwa "Literasi keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun industri keuangan".

²⁴ Dimana manfaat literasi keuangan bagi masyarakat yaitu:

- 1) Agar masyarakat dapat menggunakan produk serta layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik.
- 3) Agar terhindar dari investasi keuangan yang tidak jelas dan memahami manfaat serta risiko produk dan jasa keuangan.

Sedangkan manfaat literasi keuangan bagi industri keuangan antara lain:

- 1) Untuk meningkatkan profit institusi jasa keuangan

- 2) Untuk mengembangkan serta menciptakan produk dan jasa keuangan yang terjangkau dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2017 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat, tujuan dari literasi keuangan meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu
- 2) Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, meningkatkan pengetahuan tentang industri keuangan agar masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Kesimpulan dari tujuan tersebut, jika mahasiswa memiliki literasi yang baik maka dalam pengambilan suatu keputusan yang menyangkut keuangannya akan lebih dicermati dengan baik. Dalam perubahan perilaku secara pribadi, mahasiswa akan lebih baik dalam memanfaatkan keuangan sebaik mungkin.

c. Indikator Literasi Keuangan

Indikator literasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari buku karya Ismanto et al (2019: 136-140). Sebagai berikut:

1) Pengetahuan Keuangan

"Pengetahuan keuangan merupakan pengetahuan terkait dana, jaminan, polis asuransi dan kontrak" Ismanto, et al (2019:140). Harnovansyah, dkk (2020:151) menyatakan bahwa "Pengetahuan keuangan mempunyai hubungan yang erat dengan *financial literacy* atau edukasi keuangan" Pengetahuan keuangan dapat

diberikan untuk dipahami dengan baik melalui edukasi keuangan atau *financial literacy*.

2) Sikap keuangan

Sikap keuangan adalah perilaku dengan penggunaan terhadap keuangan pribadi. Ismanto, et al (2019:136) mengemukakan bahwa "Sikap keuangan terfokus pada pendekatan orang terhadap masalah keuangan". Orang-orang yang berpengetahuan dan terampil secara keuangan mengindikasikan adanya sikap positif terhadap transaksi keuangan.

3) Praktik keuangan

"Praktik keuangan adalah gambaran dengan keterampilan mengelola uang dan akuntansi". Ismanto, dkk (2019:139). Praktik keuangan berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangannya. Mahasiswa yang memiliki praktik keuangan pertama-tama akan memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya secara efektif dalam mengelola dan mengatur keuangan mereka untuk tujuan yang lebih besar.

4. Inklusi Keuangan

a. Pengertian ¹⁰ inklusi Keuangan

Inklusi keuangan memiliki beberapa pengertian dan indikator yang bervariasi. Berdasarkan Global Financial Inclusion Index, inklusi keuangan diartikan sebagai kepemilikan rekening pada institusi keuangan formal dan penggunaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, indikator inklusi keuangan adalah jumlah kepemilikan rekening per populasi, serta jumlah penggunaan rekening untuk menabung, menarik uang, transfer, dan pinjaman dalam dua belas bulan terakhir. Definisi dan indikator indikator inilah yang digunakan dalam banyak penelitian internasional mengenai inklusi keuangan, seperti pada penelitian Allen et al. (2016), Demircuc Kunt dan Klapper (2012,2013), dan Fungacova dan Weill (2015). Sementara itu, menurut United Nations (2016), inklusi keuangan berarti penyediaan layanan keuangan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk menarik masyarakat miskin ke dalam ekonomi formal. Inklusi keuangan dimaksudkan untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat yang tidak memiliki akses

(miskin) yang dapat dilakukan antara lain dengan membukakan rekening di lembaga keuangan formal sehingga dapat melakukan kegiatan keuangan yang akhirnya dapat memberantas kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Beck et al., 2007; Bruhn dan Love, 2014). Sementara itu, Bank Indonesia mengukur inklusi keuangan dengan menggunakan tiga dimensi yang terdiri atas akses, penggunaan, dan kualitas.

Menurut OJK Inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya secara tepat waktu, aman, dan terjangkau (POJK No. 76/POJK.07/2016).³¹ Menurut Soetino dan Setiawan (2018:136) mengemukakan bahwa, "Pada hakikatnya inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau". Dalam peraturan OJK (2016), inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inklusi Keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat (Yanti, 2019: 137). Selain itu, Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia (SNKI) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu dalam mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya (Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. 2021: 137).

b. Tujuan Inklusi Keuangan

³ Tujuan inklusi keuangan dapat tercapai dengan strategi nasional keuangan inklusif yang telah disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan pondasi SNKI yang

didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau instansi terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif.

Berikut adalah pilar dan fondasi dari SNKI:

1) Pilar edukasi keuangan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan juga jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2) Pilar hak properti masyarakat

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.

3) Pilar fasilitas intermeditasi dan saluran distribusi keuangan

Bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4) Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah

Bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai.

5) Pilar perlindungan konsumen

Bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen, penanganan, pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

6) Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif

Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

Pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas.
- 2) Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
- 3) Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Inklusi keuangan

Faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan menurut Andrianaivo dan Kpodar (2012:8) menyatakan bahwa "Ada dua faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan diantaranya perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi". Sedangkan menurut Novita (2020:1235) "Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah literasi keuangan, *financial technology* (modal sosial), jenis kelamin, usia, pendapatan, dan pendidikan".

d. Indikator Inklusi Keuangan

Bank Indonesia (2014) menyatakan "Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan suatu ukuran kinerja". Dari beberapa referensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam sebuah negara mengembangkan inklusi keuangan adalah:

- 1) Ketersediaan/akses mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
- 2) Penggunaan mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan).
- 3) Kualitas mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
- 4) Kesejahteraan mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan penggunaan jasa.

5. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 menjelaskan semua tentang ⁴¹ Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 meliputi kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kerugian daerah. Proses Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki beberapa tahap diantaranya ada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan terakhir penanggungjawaban. Proses Pengelolaan Keuangan Daerah ini dimulai dari perencanaan APBD. Penyusunan APBD dipertimbangkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pemasukan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 181 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 17-18 tentang Keuangan Negara (Latif, 2019).

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD. ¹⁷ APBD memegang fungsi otorisasi dimana APBD merupakan sebuah acuan dalam mengelola anggaran yang mana anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penerimaan dan belanja. APBD memegang fungsi perencanaan yang artinya bahwa anggaran merupakan pedoman penyusunan rencana kegiatan pada tahun yang bersangkutan. APBD memegang fungsi pengawasan sehingga APBD merupakan tolak ¹⁷ ukur dalam menilai pelaksanaan program yang direncanakan. APBD memegang fungsi alokasi yang artinya pengalokasian APBD tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerah. APBD memegang fungsi distribusi yang mana dalam pengalokasian dana, APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan keparuhan. Dan yang terakhir APBD memegang fungsi stabilisasi yang berarti bahwa APBD merupakan tolak ukur keseimbangan perekonomian daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Pengelolaan Keuangan Daerah harus

melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan realisasinya setiap tahun sesuai dengan ³⁸ peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab. Hal tersebut harus dilakukan secara optimal dikarenakan banyak anggaran yang realisasinya tidak sesuai (Pavecta, 2018)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. ¹⁶ Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:137) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah: “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Kemudian menurut Muindro Renyowijoyo (2013:199) bahwa pengertian ¹⁶ pengelolaan keuangan daerah merupakan: “subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Menurut Baldric Siregar (2015:11) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Menurut Taufiq, (2019) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Drs. H. M. Arifin, M.Si. (2018): Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu proses yang meliputi seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan ³⁹ daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah proses yang sistematis dan komprehensif untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Efektivitas Pengelolaan Keuangan Menurut Arsan Latif (2019:1)

1) Tertib

Pencatatan keuangan yang tertib harus rapi dan sistematis. Serta Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Terakhir Kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keuangan yang berlaku.

2) Efisien

Penggunaan sumber daya keuangan yang optimal untuk mencapai tujuan. Minimnya pemborosan dan kebocoran keuangan.

3) Ekonomis

Penggunaan dana yang hemat dan sesuai dengan kebutuhan. Pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Menghindari pembelian barang atau jasa yang tidak esensial.

4) Efektif

Pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan tepat dan cepat. Keberhasilan dalam mencapai target dan sasaran keuangan.

5) Transparan

Keterbukaan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan dan informasi terkait. Akuntabilitas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan.

6) Bertanggung Jawab

Penggunaan dana yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kesiapan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan.

6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat

diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD menjadi salah satu tujuan utama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian Bappenas (2020), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan PAD, antara lain:

1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, sehingga berimplikasi pada peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah. Indikator ini dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi.

2) Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi, sehingga berimplikasi pada peningkatan PAD. Indikator ini dapat diukur melalui jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

3) Efektivitas Pengelolaan PAD

Efektivitas pengelolaan PAD meliputi aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan PAD yang efektif akan meningkatkan potensi dan realisasi PAD. Indikator ini dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan

seperti rasio realisasi PAD terhadap target, rasio pajak daerah terhadap PAD, dan rasio belanja daerah terhadap PAD.

4) Keberpihakan Kebijakan Pemerintah

Keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap sektor-sektor potensial dan penciptaan iklim investasi yang kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Indikator ini dapat diukur melalui indeks kemudahan berusaha, indeks daya saing daerah, dan indeks reformasi birokrasi.

5) Kualitas Pelayanan Publik

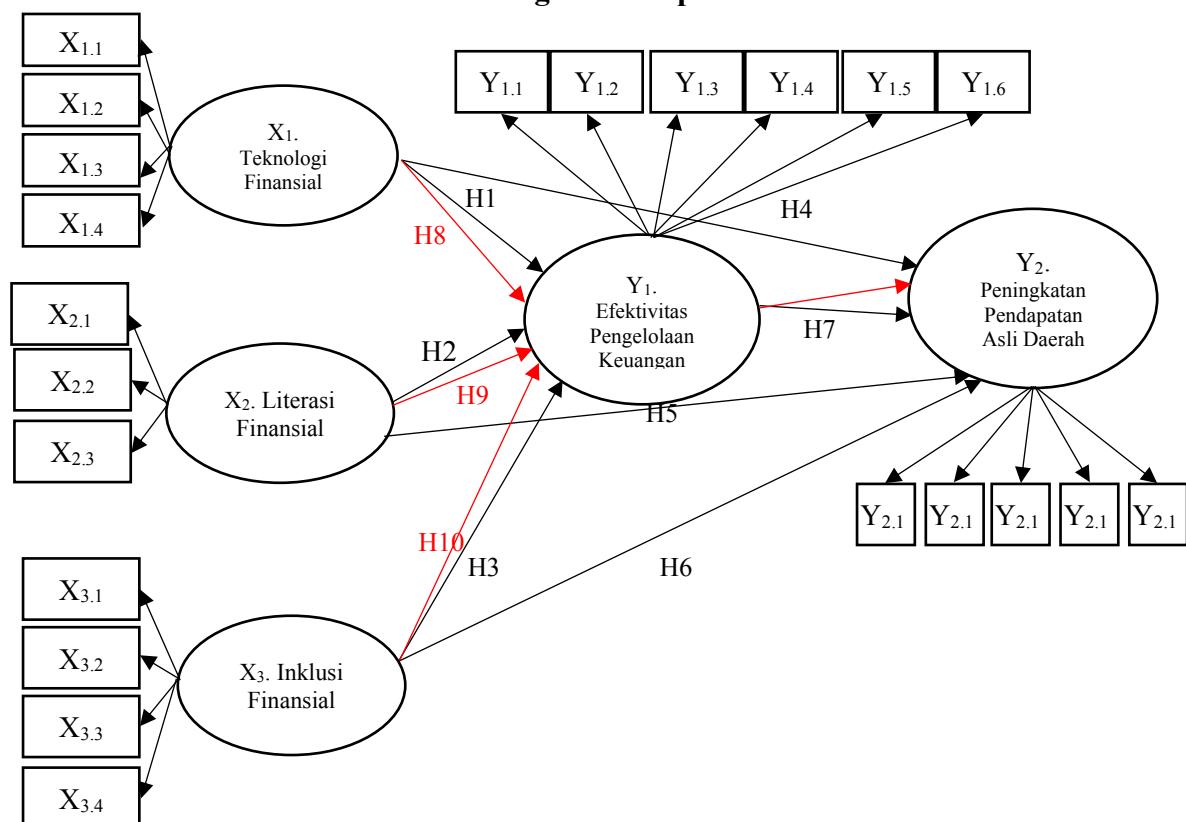
Kualitas pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Indikator ini dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2018:60) menyatakan bahwa "Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti". Berikut ini merupakan kerangka konsep penelitian:

Gambar 1

Kerangka Konseptual



Sumber Referensi Buku

X1. Teknologi Finansial Hutabarat (2018:55)	X2. Literasi Finansial Ismanto, dkk (2019:136-140)	X3. Inklusi Finansial Roberto Akyuwen (2018:16-17)	Y1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Arsan Latif (2019:1)	Y2. Peningkatan PAD Adi Suhendra (2021:3)
37 X1.1 : Pengetahuan X1.2 : Kemudahan X1.3 : Efektivitas X1.4 : Minat	X2.1 : Pengetahuan Keua X2.2 : Sikap keuangan X2.3 : Praktik keuangan	X3.1 : Ketersediaan/akses X3.2 : Penggunaan mengukur kemampuan X3.3 : Kualitas mengukur X3.4 : Kesejahteraan	Y1.1 : Tertib Y1.2 : Efisien Y1.3 : Ekonomis Y1.4 : Efektif Y1.5 : Transparan Y1.6 : Bertanggung jawab	Y2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah Y2.2 : Peningkatan Investasi Y2.3 : Efektivitas Pengelolaan PAD Y2.4 : Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Y2.5 : Kualitas Pelayanan Publik

Sumber Referensi Studi Empiris (dasar Hipotesis) :

- H₁ : Sari (2022)
- H₂ : Melisa (2019)
- H₃ : Rozalinda (2023)
- H₄ : Rahayu (2023)
- H₅ : Sari (2020)
- H₆ : Nahdia (2021)
- H₇ : Noni (2022)
- H₈ : Sari (2022), Noni (2022)
- H₉ : Melisa (2019) , Noni (2022)
- H₁₀ : Mubarak (2022), Noni (2022)

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) menyatakan bahwa "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih bersifat sementara sehingga diperlukan bukti kebenaran melalui data empiris yang terkumpul". Berdasarkan perumusan permasalahan teori yang relevan dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁: Teknologi finansial berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas pengelolaan keuangan;
- H₂: Literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas pengelolaan keuangan;
- H₃: Inklusi finansial berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas pengelolaan keuangan;

- H₄: Teknologi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- H₅: Literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- H₆: Inklusi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- H₇: Efektifitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- H₈: Teknologi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Efektifitas pengelolaan keuangan;
- H₉: Literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Efektifitas pengelolaan keuangan;
- H₁₀: Inklusi finansial berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Efektifitas pengelolaan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

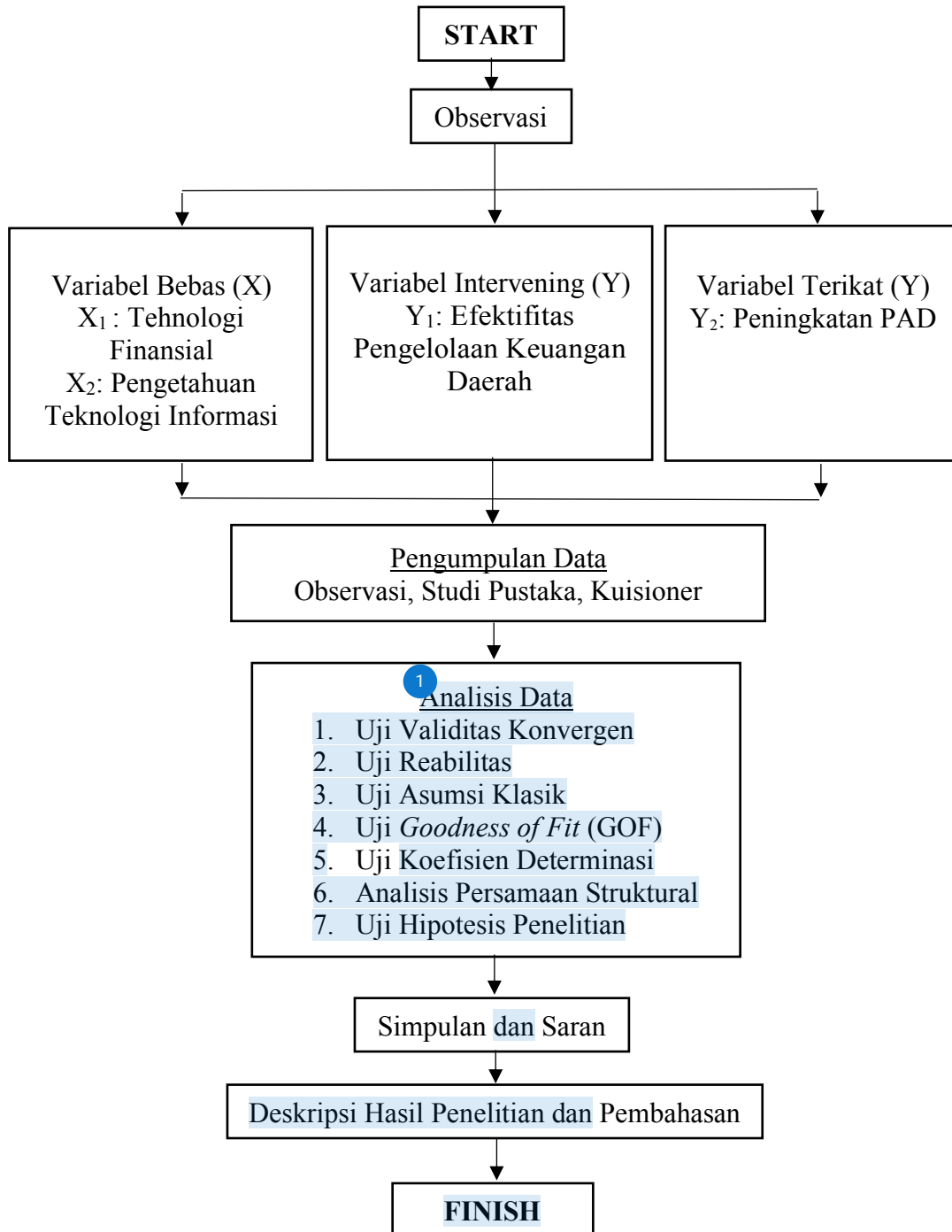
A. Rancangan Penelitian

Menurut Silaen (2018:23) “Rancangan Penelitian adalah rancangan mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Judul dalam penelitian ini adalah “Peran Teknologi Finansial, Literasi Finansial Dan Inklusi Finansial Terhadap Peningkatan PAD Melalui Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bondowoso” dengan studi pada Seluruh UPTD penghasil PAD. Rancangan penelitian dilakukan dari awal dan dilanjutkan dengan observasi lapangan dan penelitian bibliografi yang meliputi penggalan informasi dari berbagai dokumen, pencarian referensi yang lengkap dan pencarian literatur sebelumnya. Penelitian berkaitan dengan variabel penelitian. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah wawancara, dokumen dan penyebaran kuesioner kepada bendaharawan dan kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Kemudian data dianalisis menggunakan uji validitas konvergen, uji reliabilitas, uji hipotesis klasik, uji *goodness of fit*, uji koefisien determinasi, uji struktur persamaan dan uji hipotesis dengan menggunakan program Smart PLS 3.2.8. Dengan pengelolaan data selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi untuk memperjelas penelitian yang dilakukan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sialen (2018:18) menyatakan bahwa “Metode kuantitatif yaitu metodologi kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif atau inferensial”. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang mempengaruhi setiap variabel. Penelitian ini yaitu mengkaji tiga variabel bebas yaitu **Teknologi Finansial, Literasi Finansial Dan Inklusi Finansial**, satu variabel mediasi yaitu Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan satu variabel terikat yaitu Peningkatan PAD. Berikut ini merupakan susunan rancangan penelitian Peran Teknologi Finansial, Literasi Finansial Dan Inklusi Finansial

Terhadap Peningkatan PAD Melalui Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bondowoso.

Gambar 2
Rancangan Penelitian



B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat pada penelitian ini di **Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso**, tempatnya terletak di Jalan Imam Bonjol No.13 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso Kota, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur Kode Pos 68217. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, tepatnya bulan Januari s.d. Maret 2024.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) “Populasi merupakan suatu wilayah yang terdiri dari obyek-obyek atau subyek-subyek yang mempunyai kualitas dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari agar dapat menarik kesimpulan”. Menurut penjelasan diatas dapat diketahui bahwa objek dalam penelitian ini adalah Bendaharawan dan pimpinan di 25 Puskesmas dan Labkesda di Kabupaten Bondowoso. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 responden.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) mengungkapkan bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang dipilih harus mewakili seluruh karakteristik populasi agar tercermin dalam sampel yang dipilih dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili (*representative*). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2015:124) “Sampel jenuh merupakan salah satu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Sampel jenuh disebut juga dengan sensus, dimana seluruh anggota populasi akan dijadikan sampel. Penelitian ini memilih teknik sampling jenuh karena populasinya relatif kecil, sehingga sampel penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai responden yaitu 52 ASN yang termasuk dalam kategori PNS.

D. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Identifikasi Variabel

¹⁸ Dalam suatu penelitian terdapat variabel yang merupakan permasalahan yang ada dalam penelitian. Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2020:68) adalah suatu karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) sebagai (X), variabel penghubung (*intervening variable*) sebagai (Y₁) dan variabel terikat (*dependent variable*) sebagai (Y₂). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa variabel bebas sering disebut variabel stimulus atau prediktor. Variabel ini merupakan ¹ yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini ada dua adalah sebagai berikut:

- 1) Teknologi Finansial (X₁)
- 2) Literasi keuangan (X₂)
- 3) Inklusi Finansial (X₃)

b. Variabel Penghubung (*Intervening Variable*)

² Sugiyono (2017:62) mengemukakan bahwa “Variabel intervening secara umum disebut dengan variabel mediasi karena letak variabel ini posisinya berada ditengah-tengah variabel bebas dan variabel terikat, artinya variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat secara langsung. Dapat mempengaruhi secara langsung apabila memiliki sebab akibat”. Variabel intervening yang terdapat dalam penelitian ini adalah Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y₁)

¹ c. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Sugiyono (2017:39) mengemukakan bahwa “Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas tersebut”. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Peningkatan PAD (Y₂)

2. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel bertujuan untuk memudahkan proses mendapatkan dan mengelola data yang berasal dari para responden. Selain itu operasional variabel berisi kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan variabel menjadi bagian-bagian terkecil sehingga diketahui ukurannya. Operasional variabel sebagai upaya penelitian untuk menyusun secara rinci hal-hal yang meliputi nama variabel, konsep variabel, indikator, ukuran dan skala.

Sugiyono (2017:38) “Definisi Operasional Variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut”. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

1) Teknologi Finansial (X_1)

Nurrohyani & Sihaloha (2020:12-25) mengemukakan bahwa "*Financial technology* atau dikenal dengan sebutan *fintech* merupakan penggantian uang tunai menjadi non tunai dengan menggunakan aplikasi. Layanan *fintech* bisa digunakan ketika sudah tersambung dengan internet yang di akses melalui *smartphone*, sehingga penggunaannya menjadi mudah dan cepat". Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hutabarat (2018:55) dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk *Financial technology* yaitu:

a) Pengetahuan tentang *Financial Technology* ($X_{1.1}$)

Mengukur pengetahuan tentang *Financial technology*.

b) Kemudahan ($X_{1.2}$)

Memberikan kemudahan bagi konsumen dan produsen untuk mendapatkan layanan dan pelayanan yang lebih baik dalam melakukan transaksi.

c) Efektivitas ($X_{1.3}$)

Memberikan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam menggunakan *financial technology* untuk kehidupan sehari-hari.

d) Minat ($X_{1.4}$)

Mengukur minat masyarakat dan/atau mahasiswa menggunakan *financial technology* terhadap pembelian atau penggunaan jasa dan barang.

2) Literasi keuangan (X_2)

Tohani (2018:51) mengemukakan bahwa "Literasi keuangan (*financial literacy*) sebagai bagian dari budaya ekonomi sangat penting untuk dikembangkan melalui kegiatan pendidikan ". Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Indikator literasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari buku Ismanto, dkk (2019:136-140). Sebagai berikut:

a) Pengetahuan Keuangan ($X_{2.1}$)

Pengetahuan keuangan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan dana, jaminan, polis dan kontrak asuransi. Pengetahuan keuangan dapat diberikan pemahamannya melalui pendidikan keuangan atau literasi keuangan.

b) Sikap keuangan ($X_{2.2}$)

Sikap keuangan fokus pada pendekatan masyarakat terhadap masalah keuangan. Orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan keuangan mempunyai sikap positif terhadap transaksi keuangan.

c) Praktik keuangan ($X_{2.3}$)

Praktik keuangan adalah gambaran keterampilan manajemen keuangan dan akuntansi. Praktik keuangan mengacu pada tanggung jawab keuangan seseorang mengenai bagaimana keuangan dikelola.

3) Inklusi Keuangan

Menurut Soetino dan Setiawan (2018:136) menyatakan bahwa, "Pada dasarnya, inklusi keuangan adalah serangkaian upaya untuk menghilangkan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang terjangkau". Bank Indonesia (2014) menyatakan "Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan suatu ukuran kinerja".

Dari beberapa referensi, ³ indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam sebuah negara mengembangkan inklusi keuangan adalah:

- a) Ketersediaan/akses mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga ($X_{3.1}$)
- b) Penggunaan mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan) ($X_{3.2}$)
- c) Kualitas mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan ($X_{3.3}$)
- d) Kesejahteraan mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan penggunaan jasa ($X_{3.4}$)

b. Variabel Mediasi (*Intervening Variable*)

1) Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1)

Variabel mediasi penelitian yaitu Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1). ¹⁶ Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:137) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah: “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Kemudian menurut Muindro Renyowijoyo (2013:199) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan: “subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Indikator Efektivitas Pengelolaan Keuangan Menurut Arsan Latif (2019:1)

a) Tertib ($Y_{1.1}$)

Pencatatan keuangan yang tertib harus rapi dan sistematis. Serta Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Terakhir Kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keuangan yang berlaku.

b) Efisien ($Y_{1.2}$)

Penggunaan sumber daya keuangan yang optimal untuk mencapai tujuan. Minimnya pemborosan dan kebocoran keuangan.

c) Ekonomis ($Y_{1.3}$)

Penggunaan dana yang hemat dan sesuai dengan kebutuhan. Pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Menghindari pembelian barang atau jasa yang tidak esensial.

d) Efektif ($Y_{1.4}$)

Pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan tepat dan cepat. Keberhasilan dalam mencapai target dan sasaran keuangan.

e) Transparan ($Y_{1.5}$)

Keterbukaan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan dan informasi terkait. Akuntabilitas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan.

f) Bertanggung Jawab ($Y_{1.6}$)

Penggunaan dana yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kesiapan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan.

c. Variabel Terikat (Dependent Variable)

1) Peningkatan PAD

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Peningkatan PAD (Y_2). Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD menjadi salah satu tujuan utama

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian Bappenas (2020), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan PAD, antara lain:

a) Pertumbuhan Ekonomi Daerah ($Y_{2.1}$)

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, sehingga berimplikasi pada peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah. Indikator ini dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi.

b) Peningkatan Investasi ($Y_{2.2}$)

Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi, sehingga berimplikasi pada peningkatan PAD. Indikator ini dapat diukur melalui jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

c) Efektivitas Pengelolaan PAD ($Y_{2.3}$)

Efektivitas pengelolaan PAD meliputi aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan PAD yang efektif akan meningkatkan potensi dan realisasi PAD. Indikator ini dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan seperti rasio realisasi PAD terhadap target, rasio pajak daerah terhadap PAD, dan rasio belanja daerah terhadap PAD.

d) Keberpihakan Kebijakan Pemerintah ($Y_{2.4}$)

Keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap sektor-sektor potensial dan penciptaan iklim investasi yang kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Indikator ini dapat diukur melalui indeks kemudahan berusaha, indeks daya saing daerah, dan indeks reformasi birokrasi.

e) Kualitas Pelayanan Publik ($Y_{2.5}$)

Kualitas pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Indikator ini dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan cara yang berbeda. Untuk memperoleh data yang diinginkan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu guna memperoleh sejumlah data dan informasi tertentu terhadap bendaharawan dan kepala UPT di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi disertai pencatatan terhadap tingkah laku, kondisi, dan fenomena yang terjadi pada subjek yang diteliti. Kegiatan observasi ini meliputi pengamatan terhadap proses dan objek dengan tujuan memperoleh pengetahuan tentang fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang ada, yang menjadi dasar penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (2013:93) “Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.” Studi kepustakaan mencakup uraian penelitian kepustakaan dan temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta upaya menggunakan sumber-sumber terkini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa buku, kajian ahli, jurnal dan penelitian sebelumnya.

3. Kuesioner (angket)

Metode kuesioner terdiri dari sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Menurut Sugiyono (2017:142), “kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan penyajian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden”. Data yang diinginkan untuk diperoleh peneliti yakni

dengan cara memberi angket kepada bendaharawan dan kepala UPT Puskesmas dan Labkesda di lingkungan Dinas Kesehatan se-Kabupaten Bondowoso. Agar data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif, setiap alternatif jawaban diberi nilai..

Adapun cara pemberian nilai pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Skala Likert

No	Skala Pengukuran	Nilai
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, (2017:93)

F. Metode Analisa Data

1. Uji Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen biasanya melibatkan penentuan apakah data yang diteliti dapat diandalkan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Uji validitas konvergen untuk melihat apakah hubungan antara indikator penelitian dengan variabel dependen dapat dianggap valid. Validitas konvergen dalam penelitian ini dianalisis melalui program Smart PLS 3.2.8 untuk mengukur nilai AVE (*Average Variance Extracted*) dan mengukur nilai *outer loading*

Menurut Ghozali (2018:25) “Validitas konvergen merupakan korelasi untuk menguji nilai external loading dalam penelitian dengan menempatkan nilai 0,7 atau lebih tinggi dari nilai yang dapat dianggap valid, sehingga menunjukkan bahwa indeks yang digunakan sesuai dengan kenyataan”. Menurut Ghozali (2018:25) “Validitas konvergen merupakan korelasi dengan menetapkan nilai AVE sebesar 0,5 terhadap suatu penelitian, bila nilai AVE memenuhi nilai 0,5 maka indikator dalam penelitian tersebut dapat dikatakan valid karena telah memenuhi nilai AVE”. Nilai *outer loading* yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 0,7 dan nilai AVE yang harus terpenuhi dalam penelitian ini minimal angka diatas 0,5.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2014:221) menyatakan bahwa “Uji reliabilitas untuk menunjukkan bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat kehandalan (dapat dipercaya) dan suatu indikator yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen adalah Cronbach Alpha. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach alpha $> 0,7$ dan nilai Composite Reliability lebih besar dari 0,7 maka indikator penelitian dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016:154) mengemukakan bahwa “Uji asumsi klasik ada lima yaitu: uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji linieritas”. Penelitian ini hanya menggunakan dua uji hipotesis klasik karena tidak memerlukan persamaan regresi dan tidak menggunakan ketiga uji tersebut yaitu uji heterokedastisitas, uji linieritas dan uji autokorelasi karena menurut Ghozali (2013:139) “Uji heterokedastisitas tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dengan residu beberapa peneliti lain pada model regresi linier berganda. Jika varians dari residu tetap maka disebut heteroskedastisitas”. Ghozali (2013:110) mengemukakan bahwa “Uji autokorelasi tujuannya untuk mengetahui apakah pada model regresi linier berganda terdapat periode t yang error ketika terdapat faktor perancu pada periode t-1 sebelumnya, apabila terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi”. Sedangkan Menurut Riduan (2017:200) “Uji linieritas untuk mengetahui adanya hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian”. Berdasarkan penjelasan ketiga uji hipotesis klasik dapat digunakan untuk model regresi, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan persamaan tersebut. Berikut penjelasan pengujian hipotesis klasik penelitian ini :

a. Uji Multikolonieritas

Ghozali (2013:105) mengemukakan bahwa “Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model struktural ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen)”. Model persamaan struktural dikatakan baik jika tidak ada korelasi antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya; jika ada korelasi maka variabel lainnya tidak ortogonal. Variabel otonom adalah variabel penelitian independen yang korelasi antar variabel independennya sama dengan nol. Uji multikolonieritas dalam penelitian ini untuk menganalisis nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Ghozali dan Ratmono (2013:80) menyatakan “Penelitian yang baik apabila tidak terjadi multikolonieritas dengan nilai *cut off* yang dipakai apabila tolerance lebih dari 10 dan VIF yang ditetapkan kurang dari 10”. Maka dapat disimpulkan bahwa model struktural yang baik tidak menghasilkan multikolonieritas, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan nilai $VIF < 5$ karena menggunakan analisis program Smart PLS 3.2.8.

b. Uji Normalitas

Ghozali (2013:160) menyatakan bahwa “pengujian normalitas umum adalah untuk mengetahui apakah model persamaan struktural normal atau melanggar kaidah normalitas yang terdapat dalam penelitian”. Pengujian normalitas dapat dilakukan sebelum mengirimkan data yang ingin diolah berdasarkan model penelitian. Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis untuk variabel independen dan dependen berdistribusi normal. Data dikatakan cocok jika persamaan strukturalnya tidak menyimpang dari nilai *mean* atau median. Jika data menyimpang dari *mean* maka terjadi *skewness* sehingga data tersebut dapat diartikan anomali karena melanggar normalitas. Pemeriksaan normalitas dianalisis melalui program Smart PLS 3.2.8 untuk menguji nilai *Excess Kurtosis* atau *Skewness*. Menurut Ghozali (2018:28) “Untuk mengetahui nilai *Excess Kurtosis* normal dengan alpha 0,01 tidak menjauhi nilai tengah antara -2,58 hingga 2,58”. Berdasarkan teori tersebut dalam penelitian ini menggunakan nilai tengah yaitu antara -2,58 hingga 2,58.

4. Uji *goodness of fit* (GOF)

Ghozali (2013:98) menyatakan bahwa “Uji *goodness of fit* Hal ini dilakukan untuk menguji fit indeks hasil sampel untuk mengetahui pengaruh kelayakan model. Pengujian GOF dapat diartikan sebagai pengujian untuk mengetahui kecukupan model persamaan struktural. Pada dasarnya tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sebaran data sampel penelitian mengikuti sebaran teoritis tertentu. Dalam penelitian ini, tes GOF dianalisis melalui sebuah program Smart PLS 3.2.8 untuk mengukur tiga fit indeks yaitu Standardized Root Mean Square Residual, Chi-Square dan Normed Fit Index, indeks tersebut dikatakan fit apabila konsep model struktural dalam penelitian ini didirikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hair et. al (2018:176) menyatakan bahwa “Secara umum indeks fit mempunyai item-item yang harus dipenuhi untuk menguji model struktural agar dapat dianggap sebagai model yang fit”. Kategori fit indeks dalam penelitian ini adalah:

- a. Jika SRMR nilai kurang dari 0,09 maka dikatakan fit
- b. Jika Chi-Square nilai kecil maka dikatakan fit
- c. Jika NFI nilai lebih dari 0,5 maka dikatakan fit

5. Uji Koefisien Determinasi

Ghozali (2018:97) menyatakan bahwa “uji koefisien determinasi pada umumnya merupakan analisis untuk mengukur persamaan struktural dengan memeriksa nilai R-Square.” Uji koefisien yang ditentukan dalam penelitian ini menguji hubungan struktur variabel independen dengan variabel dependen setelah diketahui hasil hipotesisnya. Uji koefisien determinasi meliputi penentuan signifikansi nilai R-squared terhadap variabel dependen. Jika nilai R-squarednya berubah maka kita dapat melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di bawah ini adalah data yang menjelaskan koefisien determinasi persamaan yang dianalisis melalui program Smart PLS 3.2.8 adalah:

Tabel 3
Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi

No	Pernyataan	Keterangan
1	≤4%	Sangat Rendah
2	5%-16%	Rendah
3	17%-49%	Cukup Kuat
4	50%-79%	Kuat
5	≥80%	Sangat Kuat

Sumber: Supranto (2008:227)

6. Analisis Persamaan Struktural (*Inner Model*)

Inner Model merupakan model struktural yang berguna untuk memprediksi keakuratan struktur yang dibangun. Analisis persamaan struktural merupakan nilai koefisien regresi untuk menguji korelasi antara variabel dependen dan data variabel yang dikumpulkan dalam model struktural (model internal) yang merupakan diagram hubungan variabel-variabel penelitian. Evaluasi model struktural dilakukan dengan memeriksa koefisien antar variabel dan nilai koefisien determinasi. Inner Model dapat dianalisis dengan sistem boost melalui program Smart PLS 3.2.8 sehingga dapat dicari persamaan nilai koefisien regresi dengan menggunakan dua sistem keluaran ialah *Path Coefficient* dan *Specific Indirect Effects*. Menurut Sugiyono (2017:192) menyatakan bahwa “persamaan struktural merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh hubungan yang terjadi antara variabel terikat dengan sifat data variabel penelitian dengan menggunakan rumus struktur”. Rumus persamaan struktural yang digunakan adalah :

a. Persamaan Struktural

Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1)

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_3X_2 + b_5X_3 + e$$

Peningkatan PAD (Y_2)

$$Y_2 = a + b_2X_1 + b_4X_2 + b_6X_3 + e$$

Peningkatan PAD (Y_2)

$$Y_2 = a + b_7Y_1 + e$$

b. Persamaan Struktural dengan menggunakan variabel intervening

$$Y_2 = (\beta_8X_1Y_1) + (\beta_9X_2Y_1) + (\beta_{10}X_3Y_1)$$

Keterangan:

Y_1 : Efektifitas Pengelolaan Keuangan

Y_2 : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

β_1, β_4 : Nilai dari koefisien regresi Teknologi Finansial

β_2, β_5 : Nilai dari koefisien regresi Literasi Finansial

β_3, β_6 : Nilai dari koefisien regresi Inklusi Finansial

β_7 : Nilai dari koefisien regresi Efektifitas Pengelolaan Keuangan

X_1 : Teknologi Finansial

X_2 : Literasi Finansial

X_3 : Inklusi Finansial

7. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis meliputi pengujian suatu pernyataan dengan menggunakan teknik statistik sehingga hasil pengujian dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Pengujian hipotesis pada hakikatnya adalah mengetahui pengaruh variabel independen dan dependen dalam suatu penelitian, apakah berpengaruh signifikan atau tidak (Ghozali,2018:97). Nilai-nilai yang dianalisis dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang diperoleh dari keluaran Partial Least Squares (PLS) dengan cara membandingkan nilai sampel asli dan mengukur signifikansinya menggunakan nilai P. Ketentuan pengukuran output PLS pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai asli sampel menunjukkan dampak positif atau negatif.
- b. Apabila P value $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
- c. Suatu pengaruh dikatakan signifikan jika nilai P $\leq 0,05$

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso

⁹ Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso, dimana dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di Lapangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, maka kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesehatan serta tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan; Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan sumber daya kesehatan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan; Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan; Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau/ unit kerja lain; Pelaporan kinerja Dinas; Pelaksanaan pemberian rekomendasi, pembinaan petunjuk teknis yang diperlukan instansi dan/atau unit kerja lain; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah misi kelima (5). Berkaitan dengan

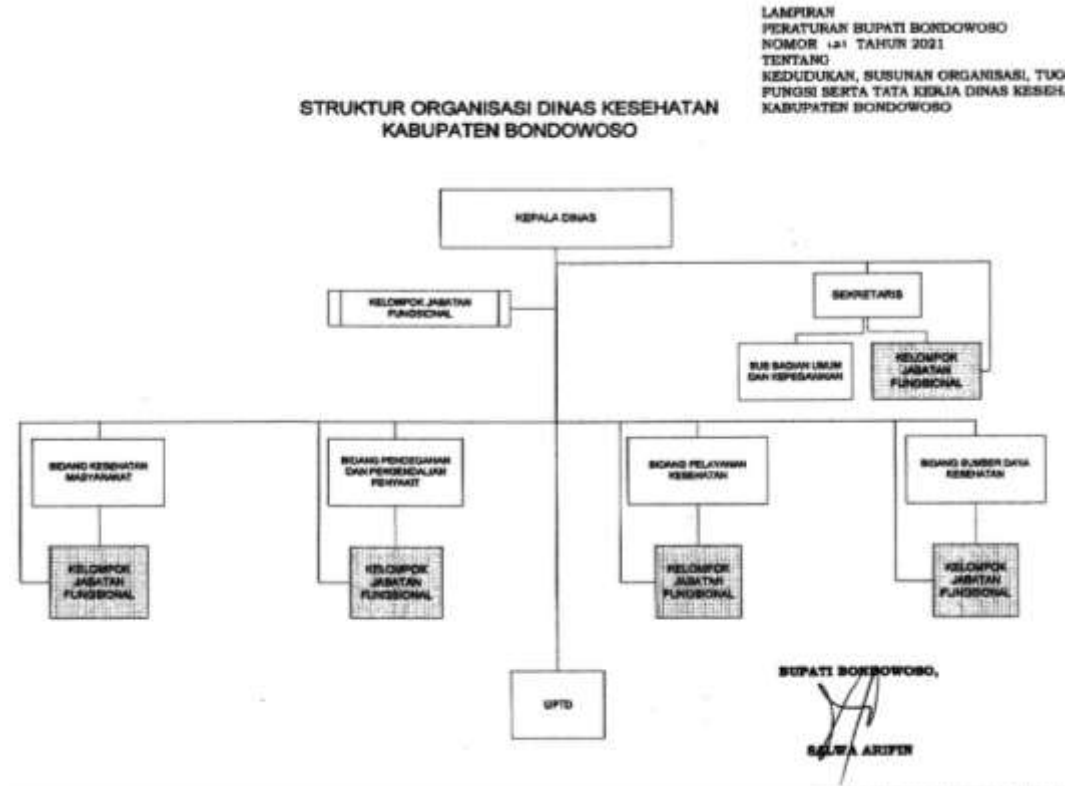
misi kelima dimana salah satu cara untuk mengukur kualitas sumber daya manusia sehat adalah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari beberapa indikator komposit (gabungan) salah satunya adalah Indeks Kesehatan (IK), yang dihitung melalui Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup telah ditetapkan sebagai indikator derajat kesehatan dalam Indonesia Sehat 2010 oleh kementerian kesehatan. Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Bondowoso tahun 2013- 2017 tampak bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Cenderung menurun, akan tetapi penurunannya sangat lambat. Hal serupa juga terjadi pada Angka Kematian Bayi. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Bondowoso adalah melalui peningkatan pelayanan kebutuhan dasar terutama kesehatan.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat apabila diterjemahkan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diwujudkan dalam memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui jaminan kesehatan terutama dalam menyongsong penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2014, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (puskesmas dan jaringannya) baik secara kuantitas dan kualitas, peningkatan anggaran kesehatan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak rusak dan tidak merata akan menjadi faktor penghambat penerapan misi kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Transfer dana daerah berupa dana alokasi khusus (DAK) merupakan peluang untuk memperbaiki kesenjangan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. Bantuan-bantuan dari lembaga donor asing seperti *Global Fund* dan *The Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN) memberikan peluang dalam penguatan sistem kesehatan terutama berkaitan dengan pembiayaan kesehatan dan perbaikan kualitas pelayanan dasar kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya.

Visi Dinas Kesehatan Bondowoso adalah Terwujudnya Bondowoso Melesat “Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam Bingkai

Iman dan Taqwa” Misi Dinas Kesehatan Bondowoso adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Unggul. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Bondowoso adalah sebagai berikut:

Gambar 3



B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

a. Deskriptif Responden

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai/ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso ³⁵ yang menjadi responden di dalam penelitian ini dapat dirincikan berdasarkan jenis kelamin seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Responden	Persentase
Laki-laki	14	27,0%
Perempuan	38	73,0%
Total	52	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa dari 52 orang responden, sebesar 27,0% atau sebanyak 14 responden terdiri dari pegawai laki-laki dan sebesar 73,0% atau sebanyak 38 responden perempuan yang berarti bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan responden laki-laki. Hal ini dikarenakan Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Seluruh Kabupaten Bondowoso didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin perempuan.

b. Deskripsi Penilaian Responden atas Variabel Penelitian

Deskripsi penelitian ini menjelaskan hasil penelitian terkait jawaban responden dari kuesioner/angket untuk variabel Teknologi finansial, Literasi finansial, Pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan PAD. Berdasarkan jawaban responden dengan kategori berdasarkan skala *likert* dapat dijelaskan seperti berikut :

1) Variabel Teknologi finansial (X_1)

Berdasarkan hasil pengujian statistik maka hasil penelitian responden terhadap Teknologi finansial adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Distribusi Jawaban Variabel Teknologi finansial

Indikator	Frekuensi	STS	TS	N	S	SS	Total
Pengetahuan	F	2	3	7	30	10	52
($X_{1.1}$)	%	3,8	5,8	13,5	57,7	19,2	100,0
Kemudahan	F	2	1	3	29	17	52
($X_{1.2}$)	%	3.8	1.9	5.8	55.8	32.7	100,0
Efektivitas	F	2	6	11	22	11	52
($X_{1.3}$)	%	3.8	11.5	21.2	42.3	21.2	100,0
Minat	F	0	2	7	18	23	52
($X_{1.4}$)	%	3.8	3.8	13.5	34.6	44.2	100,0

Sumber : Lampiran 2, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang Teknologi finansial tentang pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan empat indikator yaitu:

- a. Indikator Pengetahuan ($X_{1.1}$) menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi finansial. Dari 52 responden, 10 orang (19.2%) menyatakan sangat setuju dan 30 orang (57.7%) setuju bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang fintech. Sementara itu, 7 orang (13.5%) bersikap netral, 3 orang (5.8%) tidak setuju, dan hanya 2 orang (3.8%) yang sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai merasa cukup familiar dengan konsep dan aplikasi teknologi finansial dalam pekerjaan mereka.
- b. Indikator Kemudahan ($X_{1.2}$), respons sangat positif terlihat dengan 17 orang (32.7%) sangat setuju dan 29 orang (55.8%) setuju bahwa teknologi finansial mudah digunakan. Hanya 3 orang (5.8%) yang netral, 1 orang (1.9%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa hampir 90% pegawai menganggap fintech sebagai teknologi yang user-friendly dan tidak sulit untuk diadopsi dalam kegiatan sehari-hari mereka.
- c. Indikator Efektivitas ($X_{1.3}$) menampilkan variasi pendapat yang lebih beragam. Sebanyak 11 orang (21.2%) sangat setuju dan 22 orang (42.3%) setuju bahwa fintech efektif dalam menunjang pekerjaan mereka. Sementara itu, 11 orang (21.2%) bersikap netral, 6 orang (11.5%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Meskipun mayoritas masih memandang fintech efektif, ada indikasi bahwa beberapa pegawai mungkin belum sepenuhnya merasakan manfaat optimal dari teknologi ini.
- d. Terakhir, indikator Minat ($X_{1.4}$) menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap teknologi finansial. Sebanyak 23 orang (44.2%) sangat setuju dan 18 orang (34.6%) setuju bahwa mereka berminat menggunakan fintech. Terdapat 7 orang (13.5%) yang netral, 2 orang (3.8%) tidak setuju, dan tidak ada yang sangat tidak setuju. Data ini mengindikasikan bahwa hampir 80% pegawai memiliki ketertarikan yang kuat untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi finansial dalam pekerjaan mereka.

Kesimpulannya, data tersebut menggambarkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memiliki persepsi dan sikap yang sangat positif terhadap teknologi finansial. Mayoritas pegawai menunjukkan tingkat pengetahuan yang baik, menganggap *fintech* mudah digunakan, dan memiliki minat yang tinggi untuk mengadopsinya. Meskipun demikian, aspek efektivitas menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan, yang mungkin dapat diatasi melalui pelatihan lebih lanjut atau optimalisasi penggunaan *fintech* dalam konteks pekerjaan mereka. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan kesiapan dan potensi yang baik untuk implementasi teknologi finansial yang lebih luas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

2) Variabel Literasi finansial (X_2)

Berdasarkan hasil pengujian statistik maka hasil penelitian responden terhadap Literasi finansial adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Distribusi Jawaban Variabel Literasi finansial

Indikator	Frekuensi	STS	TS	N	S	SS	Total
Pengetahuan Keuangan ($X_{2.1}$)	F	5	6	11	20	10	52
	%	9.6	11.5	21.2	38.5	19.2	100,0
Sikap keuangan ($X_{2.2}$)	F	2	0	8	31	11	52
	%	3.8	0.0	15.4	59.6	21.2	100,0
Praktik keuangan ($X_{2.3}$)	F	2	1	5	29	15	52
	%	3.8	1.9	9.6	55.8	28.8	100,0

Sumber : Lampiran 2, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang Literasi finansial pada ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan tiga indikator yaitu:

- a) Indikator Pengetahuan Keuangan ($X_{2.1}$) menunjukkan variasi dalam pemahaman keuangan di antara pegawai. Dari 52 responden, 10 orang (19.2%) menyatakan sangat setuju dan 20 orang (38.5%) setuju bahwa mereka memiliki pengetahuan keuangan yang baik. Sementara itu, 11 orang (21.2%) bersikap netral, 6 orang (11.5%) tidak setuju, dan 5 orang

(9.6%) sangat tidak setuju. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas (57.7%) merasa memiliki pengetahuan keuangan yang cukup, masih ada sebagian pegawai yang merasa kurang dalam aspek ini.

- b) Indikator Sikap Keuangan ($X_{2.2}$), respon sangat positif terlihat dengan 11 orang (21.2%) sangat setuju dan 31 orang (59.6%) setuju bahwa mereka memiliki sikap keuangan yang baik. 8 orang (15.4%) bersikap netral, tidak ada yang tidak setuju, dan hanya 2 orang (3.8%) yang sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa hampir 81% pegawai memiliki sikap positif terhadap pengelolaan keuangan, yang merupakan aspek penting dalam Literasi finansial.
- c) Indikator Praktik Keuangan ($X_{2.3}$) juga menampilkan hasil yang positif. Sebanyak 15 orang (28.8%) sangat setuju dan 29 orang (55.8%) setuju bahwa mereka menerapkan praktik keuangan yang baik. Sementara itu, 5 orang (9.6%) bersikap netral, 1 orang (1.9%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 84% pegawai merasa telah menerapkan praktik-praktik keuangan yang sehat dalam kehidupan mereka.

Kesimpulannya, data tersebut menggambarkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat Literasi finansial yang cukup baik. Mayoritas pegawai menunjukkan pengetahuan keuangan yang memadai, sikap keuangan yang positif, dan praktik keuangan yang baik. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek pengetahuan keuangan, di mana sekitar 21% responden masih merasa netral atau kurang yakin. Sikap dan praktik keuangan menunjukkan hasil yang lebih kuat, mengindikasikan bahwa pegawai cenderung memiliki perilaku keuangan yang positif meskipun pengetahuan teoretis mereka mungkin bervariasi. Temuan ini menunjukkan potensi yang baik untuk pengembangan Literasi finansial lebih lanjut di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dengan fokus khusus pada penguatan pengetahuan keuangan untuk meningkatkan Literasi finansial secara keseluruhan.

3) Variabel Inklusi Finansial (X_3)

1 Berdasarkan hasil pengujian statistik maka hasil penelitian responden terhadap Inklusi Finansial adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Distribusi Jawaban Variabel Inklusi Finansial

Indikator	Frekuensi	STS	TS	N	S	SS	Total
Ketersediaan /akses ($X_{3.1}$)	F	2	0	6	25	19	52
	%	3.8	0.0	11.6	48.1	36.5	100,0
Mengukur Kemampuan ($X_{3.2}$)	F	2	1	4	25	20	52
	%	3.8	1.9	7.7	48.1	38.5	100,0
Kualitas mengukur ($X_{3.3}$)	F	2	0	3	22	25	52
	%	3.8	0.0	5.8	42.3	48.1	100,0
Kesejahteraan ($X_{3.4}$)	F	2	2	10	29	9	52
	%	3.8	3.8	19.2	55.8	17.3	100,0

Sumber : Lampiran 2, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang Inklusi Finansial pada ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan empat indikator yaitu:

- a) Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai Inklusi Finansial pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso berdasarkan tabel yang disajikan:
- b) Indikator Ketersediaan/akses ($X_{3.1}$) menunjukkan tingkat aksesibilitas layanan keuangan yang sangat baik. Dari 52 responden, 19 orang (36.5%) sangat setuju dan 25 orang (48.1%) setuju bahwa mereka memiliki akses yang baik ke layanan keuangan. Sementara itu, 6 orang (11.6%) bersikap netral, tidak ada yang tidak setuju, dan hanya 2 orang (3.8%) yang sangat tidak setuju. Data ini mengindikasikan bahwa lebih dari 84% pegawai merasa memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan, menunjukkan tingkat inklusi finansial yang tinggi dalam aspek ini.

- c) Untuk indikator Mengukur Kemampuan ($X_{3.2}$), respon juga sangat positif dengan 20 orang (38.5%) sangat setuju dan 25 orang (48.1%) setuju bahwa mereka mampu mengukur kemampuan finansial mereka. 4 orang (7.7%) bersikap netral, 1 orang (1.9%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 86% pegawai merasa mampu menilai dan memahami kondisi keuangan mereka sendiri, yang merupakan aspek penting dalam inklusi finansial.
- d) Indikator Kualitas mengukur ($X_{3.3}$) menampilkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 25 orang (48.1%) sangat setuju dan 22 orang (42.3%) setuju bahwa kualitas pengukuran keuangan mereka baik. Hanya 3 orang (5.8%) yang netral, tidak ada yang tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 90% pegawai merasa memiliki kualitas yang baik dalam mengukur dan mengelola keuangan mereka.
- e) Indikator Kesejahteraan ($X_{3.4}$) menunjukkan hasil yang cukup positif namun dengan variasi yang lebih besar. 9 orang (17.3%) sangat setuju dan 29 orang (55.8%) setuju bahwa inklusi finansial berkontribusi pada kesejahteraan mereka. 10 orang (19.2%) bersikap netral, 2 orang (3.8%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Meskipun mayoritas (73.1%) merasa inklusi finansial meningkatkan kesejahteraan mereka, ada indikasi bahwa beberapa pegawai mungkin belum sepenuhnya merasakan dampak positifnya.

Kesimpulannya, data tersebut menggambarkan tingkat inklusi finansial yang tinggi di kalangan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Mayoritas pegawai melaporkan akses yang baik ke layanan keuangan, kemampuan untuk mengukur kondisi keuangan mereka, dan kualitas yang baik dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, aspek kesejahteraan menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan, yang mungkin dapat diatasi melalui edukasi lebih lanjut tentang bagaimana memanfaatkan inklusi finansial untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Secara umum, temuan ini mengindikasikan bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat inklusi finansial yang

baik, yang merupakan fondasi penting untuk stabilitas keuangan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

4) Variabel Pengelolaan keuangan daerah (Y₁)

Berdasarkan hasil pengujian statistik maka hasil penelitian responden terhadap Pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Distribusi Jawaban Variabel Pengelolaan keuangan daerah

Indikator	Frekuensi	STS	TS	N	S	SS	Total
Tertib	F	2	3	9	24	14	52
(Y _{1.1})	%	3.8	5.8	17.9	46.2	26.9	100,0
Efisien	F	3	0	9	24	16	52
(Y _{1.2})	%	5.8	0.0	17.3	46.2	30.8	100,0
Ekonomis	F	2	5	12	24	9	52
(Y _{1.3})	%	3.8	9.6	23.1	46.2	17.3	100,0
Efektif	F	2	4	5	21	20	52
(Y _{1.4})	%	3.8	7.7	9.6	40.4	38.5	100,0
Transparan	F	2	3	21	15	11	52
(Y _{1.5})	%	3.8	5.8	40.4	28.8	21.2	100,0
Bertanggung jawab	F	4	5	12	19	12	52
(Y _{1.6})	%	7.7	9.6	23.1	36.5	23.1	100,0

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang Pengelolaan keuangan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan lima indikator yaitu:

- a) Indikator Tertib (Y_{1.1}) menunjukkan bahwa mayoritas pegawai menilai pengelolaan keuangan sudah tertib. Dari 52 responden, 14 orang (26.9%) sangat setuju dan 24 orang (46.2%) setuju, menunjukkan 73.1% responden memandang positif aspek ketertiban. 9 orang (17.9%) netral, 3 orang (5.8%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju, mengindikasikan ada ruang untuk peningkatan.
- b) Indikator Efisien (Y_{1.2}), respon sangat positif dengan 16 orang (30.8%) sangat setuju dan 24 orang (46.2%) setuju bahwa pengelolaan keuangan

sudah efisien. 9 orang (17.3%) netral, tidak ada yang tidak setuju, dan 3 orang (5.8%) sangat tidak setuju. Ini menunjukkan 77% responden menilai efisiensi pengelolaan keuangan sudah baik.

- c) Indikator Ekonomis ($Y_{1.3}$) menunjukkan hasil yang cukup positif dengan 9 orang (17.3%) sangat setuju dan 24 orang (46.2%) setuju. 12 orang (23.1%) netral, 5 orang (9.6%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Meskipun 63.5% menilai positif, ada indikasi bahwa aspek ekonomis masih perlu ditingkatkan.
- d) Indikator Efektif ($Y_{1.4}$) mendapat penilaian sangat baik dengan 20 orang (38.5%) sangat setuju dan 21 orang (40.4%) setuju, total 78.9% responden menilai pengelolaan keuangan sudah efektif. 5 orang (9.6%) netral, 4 orang (7.7%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju.
- e) Indikator Transparan ($Y_{1.5}$) menunjukkan variasi pendapat yang lebih besar. 11 orang (21.2%) sangat setuju, 15 orang (28.8%) setuju, namun 21 orang (40.4%) netral. 3 orang (5.8%) tidak setuju dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Ini mengindikasikan bahwa transparansi mungkin perlu mendapat perhatian lebih.
- f) Indikator Bertanggung jawab ($Y_{1.6}$) menunjukkan 12 orang (23.1%) sangat setuju dan 19 orang (36.5%) setuju bahwa pengelolaan keuangan sudah bertanggung jawab. 12 orang (23.1%) netral, 5 orang (9.6%) tidak setuju, dan 4 orang (7.7%) sangat tidak setuju.

Kesimpulannya, data tersebut menggambarkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dinilai cukup positif oleh sebagian besar pegawai. Aspek tertib, efisien, dan efektif mendapat penilaian yang sangat baik, sementara aspek ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab menunjukkan hasil yang cukup baik namun dengan ruang untuk peningkatan. Transparansi menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki persentase netral yang tinggi. Secara keseluruhan, meskipun ada variasi dalam penilaian, mayoritas pegawai cenderung memandang positif efektivitas pengelolaan keuangan daerah, namun masih ada ruang untuk perbaikan dan optimalisasi di beberapa aspek.

5) Variabel Peningkatan PAD ¹(Y₂)

Berdasarkan hasil pengujian statistik maka hasil penelitian responden terhadap Peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

Tabel 9**Distribusi Jawaban Variabel Peningkatan PAD**

Indikator	Frekuensi	STS	TS	N	S	SS	Total
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y _{2.1})	F	2	0	10	27	13	52
	%	3.8	0.0	19.2	51.9	25.0	100,0
Peningkatan Investasi (Y _{2.2})	F	4	0	11	26	11	52
	%	7.7	0	21.2	50.0	21.2	100,0
Efektivitas Pengelolaan PAD (Y _{2.3})	F	2	1	3	31	15	52
	%	3.8	1.9	5.9	59.6	28.8	100,0
Keberpihakan Kebijakan Pemerintah (Y _{2.4})	F	3	1	5	29	14	52
	%	5.8	1.9	9.6	55.8	26.9	100,0
Kualitas Pelayanan Publik (Y _{2.5})	F	2	0	3	25	22	52
	%	3.8	0,0	5.8	48.1	42.3	100,0

Sumber : Lampiran 2, 2024

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang **Peningkatan PAD** pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan empat indikator yaitu:

- a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y_{2.1}) menunjukkan penilaian yang sangat positif. Dari 52 responden, 13 orang (25.0%) sangat setuju dan 27 orang (51.9%) setuju bahwa ada pertumbuhan ekonomi daerah yang baik, totalnya 76.9%. 10 orang (19.2%) bersikap netral, tidak ada yang tidak setuju, dan hanya 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas pegawai melihat adanya kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Indikator Peningkatan Investasi (Y_{2.2}) juga mendapat respon positif dengan 11 orang (21.2%) sangat setuju dan 26 orang (50.0%) setuju, totalnya 71.2%. 11 orang (21.2%) netral, tidak ada yang tidak setuju, dan 4 orang

(7.7%) sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai melihat adanya peningkatan investasi yang berkontribusi pada PAD.

- c) Indikator Efektivitas Pengelolaan PAD ($Y_{2.3}$) dinilai sangat baik dengan 15 orang (28.8%) sangat setuju dan 31 orang (59.6%) setuju, totalnya mencapai 88.4%. Hanya 3 orang (5.9%) netral, 1 orang (1.9%) tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap efektivitas pengelolaan PAD oleh Dinas Kesehatan.
- d) Indikator Keberpihakan Kebijakan Pemerintah ($Y_{2.4}$) juga mendapat penilaian positif dengan 14 orang (26.9%) sangat setuju dan 29 orang (55.8%) setuju, totalnya 82.7%. 5 orang (9.6%) netral, 1 orang (1.9%) tidak setuju, dan 3 orang (5.8%) sangat tidak setuju. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dianggap mendukung peningkatan PAD.
- e) Indikator Kualitas Pelayanan Publik ($Y_{2.5}$) mendapat penilaian sangat baik dengan 22 orang (42.3%) sangat setuju dan 25 orang (48.1%) setuju, totalnya mencapai 90.4%. Hanya 3 orang (5.8%) netral, tidak ada yang tidak setuju, dan 2 orang (3.8%) sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dianggap sangat baik dan berkontribusi positif terhadap PAD.

Kesimpulannya, data tersebut menggambarkan bahwa upaya Peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso oleh Dinas Kesehatan dinilai sangat positif oleh mayoritas pegawai. Semua indikator menunjukkan penilaian yang baik, dengan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan PAD mendapat penilaian tertinggi. Pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, dan keberpihakan kebijakan pemerintah juga dinilai positif. Meskipun ada sedikit variasi dalam penilaian, secara keseluruhan data menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dianggap berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso melalui berbagai aspek yang diukur.

2. Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan variabel laten. Uji ini ditentukan dari nilai

outer loading dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang berasal dari setiap indikator.

Tabel 10
Uji Validitas Konvergen (*outer loading*)

Indikator	X ₁ Teknologi finansial	X ₂ Literasi Finansial	X ₃ Inklusi Finansial	Y ₁ Pengelolaan keuangan daerah	Y ₂ Peningkatan PAD	Ket
X _{1.1}	0,819					Valid
X _{1.2}	0,786					Valid
X _{1.3}	0,779					Valid
X _{1.4}	0,861					Valid
X _{2.1}		0,789				Valid
X _{2.2}		0,909				Valid
X _{2.3}		0,926				Valid
X _{3.1}			0,900			Valid
X _{3.2}			0,848			Valid
X _{3.3}			0,888			Valid
X _{3.4}			0,788			Valid
Y _{1.1}				0,806		Valid
Y _{1.2}				0,871		Valid
Y _{1.3}				0,801		Valid
Y _{1.4}				0,856		Valid
Y _{1.5}				0,854		Valid
Y _{1.6}				0,744		Valid
Y _{2.1}					0,895	Valid
Y _{2.2}					0,845	Valid
Y _{2.3}					0,947	Valid
Y _{2.4}					0,916	Valid
Y _{2.5}					0,888	Valid

Sumber :Lampiran 3, 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa nilai outer loading untuk masing-masing indikator (X_{1.1}, X_{1.2}, X_{1.3}, X_{1.4}, X_{2.1}, X_{2.2}, X_{2.3}, X_{2.4}, Y_{1.1}, X_{3.1}, X_{3.2}, X_{3.3}, X_{3.4}, Y_{1.1}, Y_{1.2}, Y_{1.3}, Y_{1.4}, Y_{1.5}, Y_{1.6}, Y_{2.1}, Y_{2.2}, Y_{2.3}, Y_{2.4}, Y_{2.5}) yaitu lebih dari 0,7 dengan demikian intrumen penelitian dapat dinyatakan valid (angka berwarna hijau). Kemudian pada nilai Validitas konvergen AVE disajikan sebagai berikut :

Tabel 11
Uji Validitas Konvergen (AVE)

Varibel Penelitian	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	<i>Cut Off</i>	Keterangan
X ₁ . Teknologi finansial	0,695	0,5	Valid
X ₂ . Literasi finansial	0,769	0,5	Valid
X ₃ . Inklusi Finansial	0,735	0,5	Valid
Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah	0,677	0,5	Valid
Y ₂ . Peningkatan PAD	0,811	0,5	Valid

Sumber : Lampiran 3, Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hasil *Average Variance Extracted* diatas 0,5 (angka berwarna hijau) maka dapat diartikan bahwa instrumen yang digunakan di dalam penelitian dikatakan “*Valid*”.

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha*. Instrument penelitian dikatakan reliable apabila memiliki nilai lebih besar dari 0,70 dan mencapai *composite reliability* di atas 0,70. Pada *output Construct Reliability and Validity*, selanjutnya disajikan dalam Tabel seperti berikut ini :

Tabel 12
Uji Reliabilitas

Variable Penelitian	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X ₁ . Teknologi finansial	0,827	Reliabel
X ₂ . Literasi finansial	0,847	Reliabel
X ₃ . Inklusi Finansial	0,879	Reliabel
Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah	0,904	Reliabel
Y ₂ . Peningkatan PAD	0,942	Reliabel

Sumber: Lampiran 3, Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 12 data diatas, menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 dengan demikian instrumen yang digunakan reliable.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Collinierity Statistics* (VIF) pada “*Inner VIF Values*” pada hasil analisis aplikasi *partial least square Smart PLS 3.2.8*, kemudian disajikan Tabel asumsi klasik multikolinieritas seperti berikut ini:

Tabel 13
Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Varibel Penelitian	X ₁ . Teknologi finansial	X ₂ . Literasi finansial	X ₃ Inklusi Finansial	Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan	Y ₂ . Peningkatan PAD
X ₁ . Teknologi finansial				4,405	4,841
X ₂ . Literasi finansial				3,448	4,388
X ₃ . Inklusi Finansial				3,175	3,184
Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah					3,686
Y ₂ . Peningkatan PAD					

Sumber : Lampiran 4, 2024

1 Pada aplikasi *smart PLS 3.2.8* dikatakan tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik “Multikolinieritas” apabila nilai VIF (*varians inflation factor*) $\leq 5,00$, namun apabila nilai VIF $> 5,00$ maka melanggar asumsi Multikolinieritas atau variabel bebas saling mempengaruhi. Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat dilihat Nilai VIF pada Teknologi finansial terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar $4,405 \leq 5,00$. Nilai VIF Literasi finansial terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar $3,448 \leq 5,00$. Nilai VIF inklusi keuangan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar $3,175 \leq 5,00$. Nilai VIF Teknologi finansial terhadap Peningkatan PAD sebesar $4,841 \leq 5,00$. Nilai VIF Literasi finansial terhadap Peningkatan PAD sebesar $4,388 \leq 5,00$. Nilai VIF Inklusi keuangan terhadap Peningkatan PAD sebesar $3,184 \leq 5,00$. Nilai VIF Efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap Peningkatan PAD adalah $3,686 \leq 5,00$. Jadi dapat di simpulkan bahwa keempat variabel tersebut terbukti tidak melanggar asumsi multikolinieritas karena nilai VIF (*varians inflation factor*) $\leq 5,00$.

1. b. Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing data penelitian tiap variabel terdistribusi normal atau tidak, dalam arti distribusi data tidak menjauhi nilai tengah (*median*) yang berakibat pada penyimpangan (*standart deviation*) yang tinggi. Dikatakan tidak melanggar asumsi normalitas apabila nilai *Excess Kurtosis* atau *Skewness* berada dalam rentang $-2,58 < CR < 2,58$. Selanjutnya disajikan tabel uji asumsi klasik normalitas seperti berikut ini :

Tabel 14
Uji Asumsi Klasik Normalitas

Nama	Kelebihan kurtosis	Kecondongan (Skewness)	Keterangan
X _{1.1}	1,91	-1,24	Normal
X _{1.2}	2,329	-1,745	Normal
X _{1.3}	-0,047	-0,674	Normal
X _{1.4}	1,567	-1,322	Normal
X _{2.1}	-0,434	-0,628	Normal
X _{2.2}	2,005	-1,483	Normal
X _{2.3}	2,552	-1,555	Normal
X _{3.1}	3,746	-1,582	Normal
X _{3.2}	2,542	-1,658	Normal
X _{3.3}	2,455	-2,015	Normal
X _{3.4}	2,004	-1,157	Normal
Y _{1.1}	2,048	-1,153	Normal
Y _{1.2}	2,031	-1,077	Normal
Y _{1.3}	0,323	-0,74	Normal
Y _{1.4}	1,047	-1,22	Normal
Y _{1.5}	0,09	-0,294	Normal
Y _{1.6}	-0,122	-0,646	Normal
Y _{2.1}	2,406	-1,251	Normal
Y _{2.2}	1,788	-1,251	Normal
Y _{2.3}	2,564	-1,758	Normal
Y _{2.4}	2,941	-1,563	Normal
Y _{2.5}	2,439	-1,945	Normal

Berdasarkan Tabel 14 diatas, maka dapat diartikan bahwa sebaran data seluruh indikator tersebut terdistribusi normal.

5. Uji *Goodness Of Fit* (GOF)

Uji *goodness of fit* (GOF) bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu ataukah

tidak. Pada *Smart PLS* 3.2.8, uji ini menggunakan tiga ukuran *fit* model yaitu SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*), *Chi Square* dan NFI (*Normed Fit Index*). Model penelitian dikatakan *fit* apabila konsep struktural yang dibangun di dalam penelitian telah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian bisa diterima baik dari segi teoritis maupun praktis. Selanjutnya disajikan Tabel uji *goodness of fit* seperti berikut:

Tabel 15
Uji Goodness Of Fit (GOF)

Kriteria	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>	<i>Cut Off</i>	Keterangan Model
SRMR	0,086	0,086	< 0.09	Baik
d-ULS	1,881	1,881	> 0.05	Baik
d G	1,979	1,979	< 0.05	Baik
<i>Chi-Square</i>	444,484	444,484	Diharapkan Kecil	Baik
NFI	0,673	0,673	$> 0,5$ (mendekati angka 1)	Baik

Sumber : Lampiran 4, Tahun 2024

¹ Berdasarkan Tabel 15 diatas maka bisa diketahui bahwa nilai SRMR yaitu 0,092 maka model dinyatakan *fit*. Hasil tersebut merujuk dari nilai SRMR $\leq 0,09$ model dinyatakan layak. *Chi-Square* diharapkan kecil dan nilai NFI $> 0,5$ atau mendekati angka 1.

6. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dapat diketahui melalui nilai *R-Square*. Pada *Output R-Square*, selanjutnya disajikan dalam Tabel uji koefisien determinasi seperti berikut:

Tabel 16
Uji Koefisien Determinasi

Variabel Terikat	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah	0,729	0,712
Y ₂ . Peningkatan PAD	0,875	0,864

Sumber : Lampiran 4, Tahun 2024

2 Berdasarkan Tabel tersebut, dapat diartikan bahwa:

- Variabel Teknologi finansial (X_1) dan Literasi finansial (X_2) mempengaruhi Pengelolaan keuangan daerah (Y_1) sebesar 0,729 (72,9%), sedangkan sisanya 27,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.
- Variabel Teknologi finansial (X_1) dan Literasi finansial (X_2) mempengaruhi Peningkatan PAD (Y_2) sebesar 0,875 (87,5%), sedangkan sisanya 12,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

7. Analisis Persamaan Struktural (*Inner model*)

Inner model bertujuan untuk mengetahui serta menguji hubungan antara konstruk *eksogen* dan *endogen* yang telah dihipotesiskan. Penyajian Tabel analisis persamaan struktural (*inner model*) dapat dilihat sebagai berikut :

1 Tabel 17

Analisis Persamaan Struktural (*Inner model*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistich (IO/STDEV1)	P Values
X ₁ . Teknologi finansial -> Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan	0,344	0,345	0,159	2,161	0,015
X ₂ . Literasi Finansial -> Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah	0,505	0,507	0,125	4,025	0,000
X ₃ . Inklusi Finansial -> Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah	0,048	0,043	0,172	0,280	0,390
X ₁ . Teknologi finansial -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,187	0,182	0,130	1,444	0,074
X ₂ . Literasi Finansial -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,338	0,340	0,117	2,882	0,002
X ₃ . Inklusi Finansial -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,392	0,387	0,125	3,128	0,001
Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,097	0,111	0,108	0,902	0,184

1 Sumber : Lampiran : 5, Tahun 2024

Hasil analisis penelitian dengan menggunakan analisis *Smart PLS (partial least square)* tersebut selanjutnya dibuat persamaan struktural.

a. Persamaan struktural (*inner model*)

$$\begin{aligned} Y_1 &= a + b_1X_1 + b_3X_2 + b_5X_3 + e \\ &= a + 0,344X_1 + 0,505X_2 + 0,048X_3 + e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= a + b_2X_1 + b_4X_2 + b_6X_3 + e \\ &= a + 0,187X_1 + 0,338X_2 + 0,392X_3 + e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= a + b_7Y_1 + e \\ &= 0,097Y_1 \end{aligned}$$

b. Persamaan struktural (*inner model*) dengan variabel *intervening*

$$\begin{aligned} Y_2 &= (\beta_8X_1Y_1) + (\beta_9X_2Y_1) + (\beta_{10}X_3Y_1) + e \\ &= 0,033X_1 + 0,049X_2 + 0,005X_3 + e \end{aligned}$$

Persamaan linier tersebut menunjukkan arti dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

b_1 (0,344) : Koefisien regresi Teknologi finansial (X_1) untuk uji berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan daerah (Y_1), artinya kenaikan variabel sebesar 1 (satu) satuan. Maka Efektivitas pengelolaan meningkat sebesar 0,344 dengan asumsi variabel (Literasi Finansial dan Inklusi Finansial) nilainya konstan.

b_2 (0,505) : Koefisien regresi Literasi finansial (X_2) untuk uji pengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1), artinya kenaikan variabel sebesar 1 (satu) satuan. Maka Efektivitas pengelolaan keuangan daerah meningkat sebesar 0,505 dengan asumsi variabel (Tekologi Finansial dan Inklusi Finansial) nilainya konstan.

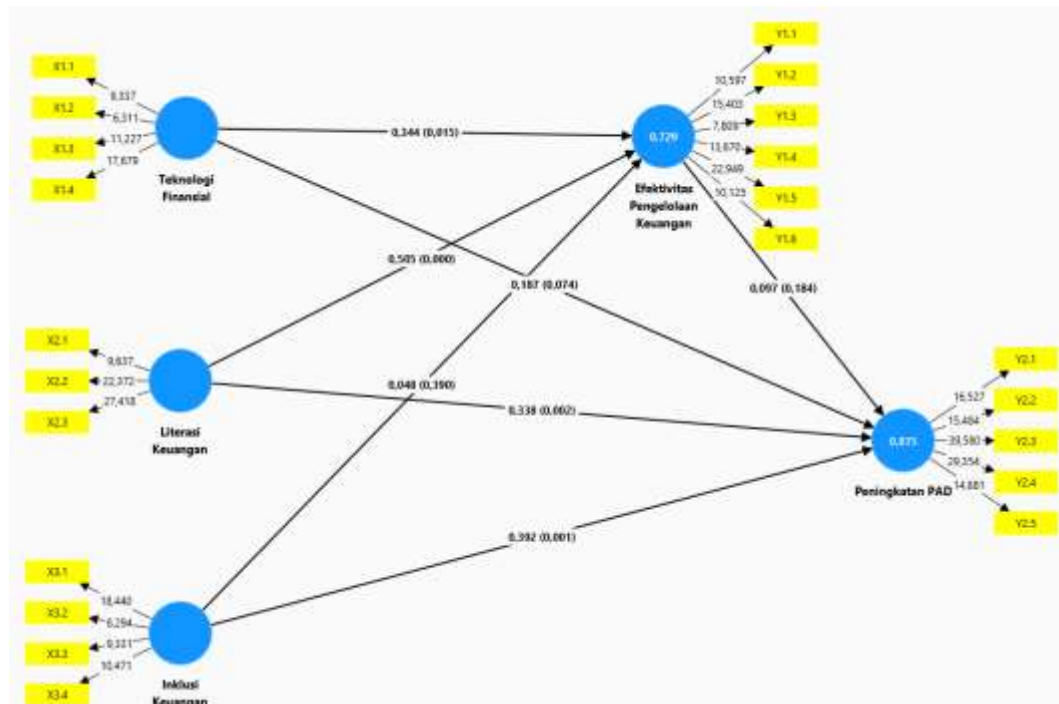
b_3 (0,048) : Koefisien regresi Inklusi finansial (X_3) untuk uji pengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1), artinya kenaikan variabel sebesar 1 (satu) satuan. Maka Efektivitas pengelolaan keuangan daerah meningkat sebesar 0,484 dengan asumsi variabel (Literasi Finansial dan Tekologi Finansial) nilainya konstan.

- b_4 (0,187) : Koefisien regresi Teknologi finansial (X_1) untuk uji pengaruh terhadap Peningkatan PAD (Y_2), artinya kenaikan variabel sebesar 1 (satu) satuan. Maka Peningkatan PAD meningkat sebesar 0,187 dengan asumsi variabel (Inklusi Finansial, Literasi finansial dan Efektivitas pengelolaan keuangan) nilainya konstan.
- b_5 (0,338) : Koefisien regresi Literasi finansial (X_2) untuk uji pengaruh terhadap Peningkatan PAD (Y_2), artinya kenaikan variabel sebesar 1 (satu) satuan. Maka Peningkatan PAD meningkat sebesar 0,338 dengan asumsi variabel (Teknologi finansial, Inklusi Finansial, dan Efektivitas pengelolaan keuangan) nilainya konstan.
- b_6 (0,392) : Koefisien regresi Inklusi finansial (X_2) untuk uji pengaruh terhadap Peningkatan PAD (Y_2), artinya kenaikan variabel sebesar 1 (satu) satuan. Maka Peningkatan PAD meningkat sebesar 0,392 dengan asumsi variabel (Teknologi finansial, Literasi finansial, dan Efektivitas pengelolaan keuangan) nilainya konstan.
- b_7 (0,097) : Koefisien regresi Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1) untuk uji pengaruh terhadap Peningkatan PAD (Y_2), artinya kenaikan variabel sebesar 1 (satu) satuan. Maka Peningkatan PAD meningkat sebesar 0,097.

8. Uji Hipotesis Penelitian Pengaruh Langsung

Uji hipotesis penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganalisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun gambar uji model struktural dalam PLS disajikan sebagai berikut :

Gambar 4
Hasil Uji Model Struktural PLS



Sumber : Lampiran 5, Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, hasil uji hipotesis menggunakan aplikasi *Smart PLS* disajikan dalam tabel seperti berikut ini :

Tabel 18
Uji Hipotesis Penelitian

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistich (IO/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
X ₁ . Teknologi finansial -> Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah	0,344	0,345	0,159	2,161	0,015
X ₂ . Literasi Finansial -> Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah	0,505	0,507	0,125	4,025	0,000
X ₃ . Inklusi Finansial -> Y ₁ . Efektivitas	0,048	0,043	0,172	0,280	0,390

Pengelolaan keuangan daerah					
X ₁ . Teknologi finansial -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,187	0,182	0,130	1,444	0,074
X ₂ . Literasi Finansial -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,338	0,340	0,117	2,882	0,002
X ₃ . Inklusi Finansial -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,392	0,387	0,125	3,128	0,001
Y ₁ . Efektivitas Pengelolaan keuangan -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,097	0,111	0,108	0,902	0,184

Sumber : Lampiran 5, Tahun 2024

² Kriteria pengukuran *output* PLS :

- 1) Nilai **Original sampel** : menunjukkan pengaruh **Negatif** atau **Positif**
- 2) Nilai P value : digunakan untuk mengukur signifikan berpengaruh.

Nilai **P value** lebih besar dari 0,05 ($> 0\%$) maka **tidak berpengaruh signifikan**. Jika nilai **P value** kurang dari 0,5 ($\leq 0\%$) maka **berpengaruh signifikan**.

Berdasarkan Tabel diatas, selanjutnya hasil uji hipotesis disajikan sebagai berikut :

- 1) **Hipotesis 1**. Teknologi finansial (X₁) ¹ berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y₁)
 Hasil uji hipotesis pertama dengan mengacu pada nilai *original sampel* yang positif (0,344) dengan nilai *p value* yaitu sebesar **0,015** ($< 0,05$), maka dapat disimpulkan Teknologi finansial (Y₁) berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y₁). Dengan demikian **Hipotesis 1 diterima**.
- 2) **Hipotesis 2**. Literasi finansial (X₂) ¹ berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y₁)
 Hasil uji hipotesis kedua dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu positif (0,505) dengan nilai *P value* yaitu sebesar **0,000** ($< 0,05$), maka dapat disimpulkan Literasi finansial (X₂) berpengaruh signifikan positif terhadap

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1). Dengan demikian **Hipotesis 2 diterima**.

- 3) **Hipotesis 3**. Inklusi finansial (X_3)¹ berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1)

Hasil uji hipotesis ketiga dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu positif (0,048) dengan nilai *P value* yaitu sebesar **0,390** ($>0,05$), maka dapat disimpulkan Inklusi finansial (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1). Dengan demikian **Hipotesis 3 ditolak**.

- 4) **Hipotesis 4**. Teknologi finansial (X_1)¹ berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2)

Hasil uji hipotesis keempat dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu negatif (0,187) dengan nilai *P value* yaitu sebesar **0,074** ($>0,05$), maka dapat disimpulkan Teknologi finansial (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2). Dengan demikian **Hipotesis 4 ditolak**.

- 5) **Hipotesis 5**. Literasi finansial (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2)

Hasil uji hipotesis kelima dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu negatif (0,338) dengan nilai *P value* yaitu sebesar **0,002** ($<0,05$), maka dapat disimpulkan Literasi finansial (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2). Dengan demikian **Hipotesis 5 diterima**.

- 6) **Hipotesis 6**. Inklusi finansial (X_3)¹ berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2)

Hasil uji hipotesis keenam dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu negatif (0,392) dengan nilai *P value* yaitu sebesar **0,001** ($<0,05$), maka dapat disimpulkan Inklusi finansial (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2). Dengan demikian **Hipotesis 6 diterima**.

- 7) **Hipotesis 7**. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1)¹ berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2)

Hasil uji hipotesis ketujuh dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu positif (0,255) dengan nilai *P value* yaitu sebesar **0,184** ($>0,05$), maka dapat

disimpulkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2). Dengan demikian **Hipotesis 7 ditolak**.

b. Uji Hipotesis Penelitian Pengaruh Tidak Langsung / Uji Melalui Intervening Variabel

Penyajian tabel uji hipotesis penelitian (pengaruh tidak langsung) disajikan dalam sebagai berikut :

Tabel 19
Uji Hipotesis Penelitian Melalui Intervening

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistich (10/STDEV1)</i>	<i>P Values</i>
X ₁ . Teknologi finansial -> Y ₁ . Efektivitas pengelolaan keuangan daerah -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,033	0,041	0,047	0,706	0,431
X ₂ . Literasi finansial -> Y ₁ . Efektivitas pengelolaan keuangan daerah -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,049	0,055	0,057	0,868	0,193
X ₃ . Inklusi finansial -> Y ₁ . Efektivitas pengelolaan keuangan daerah -> Y ₂ . Peningkatan PAD	0,005	0,003	0,027	0,173	0,431

- 1) **Hipotesis 8**. Teknologi finansial (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2) melalui Pengelolaan keuangan daerah (Y_1)
Hasil uji hipotesis kedelapan dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu (0,033) dengan nilai *P values* yaitu sebesar **0,431** ($>0,05$), maka dapat disimpulkan Teknologi finansial (X_1) terhadap Peningkatan PAD (Y_2) melalui Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 8 ditolak**.
- 2) **Hipotesis 9**. Literasi finansial (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2) melalui Pengelolaan keuangan daerah (Y_1)
Hasil uji hipotesis kesembilan dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu (0,049) dengan nilai *P values* yaitu sebesar **0,193** ($>0,05$), maka dapat

disimpulkan Literasi finansial (X_1) terhadap Peningkatan PAD (Y_2) melalui Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1) berpengaruh signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 9 ditolak**.

3) **Hipotesis 10**. Inklusi finansial (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y_2) melalui Pengelolaan keuangan daerah (Y_1)

Hasil uji hipotesis kesepuluh dengan mengacu pada nilai *original sampel* yaitu (0,005) dengan nilai *P values* yaitu sebesar **0,431** ($>0,05$), maka dapat disimpulkan Inklusi finansial (X_1) terhadap Peningkatan PAD (Y_2) melalui Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y_1) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 10 ditolak**.

C. Pembahasan

Pengelolaan keuangan daerah menjadi tolak ukur untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan mengelola keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso kedepannya. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi mediasi dari efek korelasi antara variabel Teknologi finansial, Literasi finansial dan Inklusi finansial terhadap Peningkatan PAD, hal ini dapat menunjukkan hubungan antara Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan PAD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor seperti Teknologi finansial dan Literasi finansial dalam menentukan tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah utamanya untuk meningkatkan kesadaran mengenai Peningkatan PAD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

1. Pengaruh Teknologi finansial Terhadap Pengelolaan keuangan daerah

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa Teknologi Finansial (Y_1) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Hal ini dibuktikan dengan nilai *original sampel* yang positif sebesar 0,344 dan nilai *p-value* 0,015 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan dan pemahaman teknologi finansial di kalangan pegawai Dinas Kesehatan berkorelasi dengan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan

keuangan daerah. Pengaruh positif ini mungkin disebabkan oleh kemampuan teknologi finansial dalam mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi pencatatan, dan memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa studi terdahulu yang telah mengeksplorasi hubungan antara teknologi finansial dan efektivitas pengelolaan keuangan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) menemukan bahwa implementasi teknologi finansial dalam pemerintahan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Wijaya dan Nugroho (2021) juga menunjukkan bahwa adopsi teknologi finansial dalam sektor publik berkontribusi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa integrasi teknologi finansial dalam manajemen keuangan pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

2. Pengaruh Literasi finansial Terhadap Pengelolaan keuangan daerah

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa Literasi Finansial (X_2) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Hal ini dibuktikan dengan nilai original sampel yang positif sebesar 0,505 dan nilai p-value 0,000 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi finansial di kalangan pegawai Dinas Kesehatan, semakin efektif pula pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan. Pengaruh positif yang kuat ini mungkin disebabkan oleh peningkatan pemahaman konsep keuangan, kemampuan analisis, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan sebagai hasil dari literasi finansial yang baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa studi terdahulu yang telah mengeksplorasi hubungan antara literasi finansial dan efektivitas pengelolaan keuangan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lusardi dan Mitchell (2014) menemukan bahwa literasi finansial yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan

kualitas pengambilan keputusan keuangan. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Arifin et al. (2017) pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia juga menunjukkan bahwa literasi finansial pegawai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa investasi dalam meningkatkan literasi finansial pegawai pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan.

3. Pengaruh Literasi finansial Terhadap Pengelolaan keuangan daerah

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Inklusi Finansial (X_3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Hal ini dibuktikan dengan nilai original sampel yang positif namun sangat kecil sebesar 0,048 dan nilai p-value 0,390 yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada hubungan positif yang sangat lemah, tingkat inklusi finansial di kalangan pegawai Dinas Kesehatan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan, atau karena inklusi finansial mungkin belum secara langsung terintegrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun hasil ini bertentangan dengan beberapa ekspektasi teoretis, temuan serupa telah dilaporkan dalam beberapa studi terdahulu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2019) menemukan bahwa inklusi finansial tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, terutama jika tidak disertai dengan peningkatan kapasitas dan sistem yang mendukung. Selain itu, studi oleh Wibowo dan Suharto (2018) juga menunjukkan bahwa pengaruh inklusi finansial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan faktor-faktor moderasi lainnya. Temuan dalam penelitian ini menyoroti kompleksitas hubungan antara inklusi finansial dan efektivitas pengelolaan

keuangan daerah, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor mediasi dan moderasi yang mungkin mempengaruhi hubungan ini.

4. Pengaruh Teknologi finansial Terhadap Peningkatan PAD

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa Teknologi Finansial (X_1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y_2) di Kabupaten Bondowoso. Hal ini dibuktikan dengan nilai original sampel yang negatif sebesar -0,187 dan nilai p-value 0,074 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada hubungan negatif yang lemah, penggunaan teknologi finansial di Dinas Kesehatan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Hasil ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti implementasi teknologi finansial yang belum optimal, kurangnya integrasi dengan sistem pendapatan daerah, atau adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi PAD.

Meskipun hasil ini tidak sesuai dengan beberapa ekspektasi awal, temuan serupa telah dilaporkan dalam beberapa studi terdahulu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Pranoto (2017) menemukan bahwa pengaruh teknologi finansial terhadap peningkatan pendapatan daerah tidak selalu langsung dan signifikan, terutama dalam tahap awal implementasi. Selain itu, studi oleh Widayat et al. (2020) juga menunjukkan bahwa efektivitas teknologi finansial dalam meningkatkan PAD sangat bergantung pada faktor-faktor pendukung lain seperti kesiapan infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan keterampilan sumber daya manusia. Temuan dalam penelitian ini menyoroti kompleksitas hubungan antara teknologi finansial dan peningkatan PAD, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mengimplementasikan teknologi finansial untuk tujuan peningkatan pendapatan daerah.

5. Pengaruh Literasi finansial Terhadap Peningkatan PAD

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima, dapat disimpulkan bahwa Literasi Finansial memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan memiliki

dampak penting terhadap kontribusi mereka pada pendapatan daerah. Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh nilai original sampel mengindikasikan bahwa mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan hubungan antara literasi finansial dan peningkatan PAD.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara literasi finansial dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Misalnya, studi oleh Pratiwi (2019) menemukan bahwa peningkatan literasi finansial masyarakat berkorelasi positif dengan partisipasi dalam pembayaran pajak daerah. Sementara itu, penelitian Rahman et al. (2021) mengungkapkan bahwa literasi finansial memiliki efek tidak langsung terhadap PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Perbedaan hasil ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara literasi finansial dan PAD yang mungkin dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bondowoso, khususnya yang berasal dari Dinas Kesehatan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara literasi finansial dan kontribusi terhadap PAD. Upaya peningkatan literasi finansial masyarakat harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif dalam pembayaran retribusi kesehatan dan pajak daerah. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi variabel-variabel moderasi atau mediasi yang dapat mengoptimalkan pengaruh literasi finansial terhadap peningkatan PAD di sektor kesehatan.

6. Pengaruh Inklusi finansial daerah Terhadap Peningkatan PAD

Hasil uji hipotesis keenam menunjukkan bahwa Inklusi Finansial (X_3) memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y_2) di Kabupaten Bondowoso. Nilai original sampel yang negatif (-0,392) dengan P value 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 mengonfirmasi signifikansi pengaruh ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat memiliki dampak penting terhadap PAD, meskipun arah hubungannya negatif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara inklusi finansial dan pendapatan daerah. Misalnya, studi oleh Sanjaya dan Nursechafia (2016) menemukan bahwa peningkatan inklusi finansial berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD. Sementara itu, penelitian Wulandari et al. (2020) menunjukkan bahwa inklusi finansial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Namun, hasil negatif dalam studi Anda menunjukkan adanya kompleksitas dalam hubungan ini yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Untuk mengoptimalkan peran inklusi finansial dalam peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso, khususnya yang terkait dengan Dinas Kesehatan, diperlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hubungan negatif ini. Mungkin ada variabel moderasi atau mediasi yang belum teridentifikasi. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya meningkatkan akses layanan keuangan, tetapi juga mendorong penggunaan layanan tersebut untuk aktivitas yang berkontribusi langsung pada PAD, seperti pembayaran retribusi kesehatan atau investasi dalam sektor kesehatan lokal. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya kontribusi finansial terhadap pembangunan daerah melalui PAD juga perlu ditingkatkan.

7. Pengaruh Efektivitas pengelolaan keuangan daerah daerah Terhadap Peningkatan PAD

Hasil uji hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y_2) di Kabupaten Bondowoso. Meskipun nilai original sampel positif (0,255), nilai P value sebesar 0,184 yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menarik karena bertentangan dengan ekspektasi umum bahwa pengelolaan keuangan yang efektif seharusnya berkontribusi pada peningkatan PAD.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan PAD dengan hasil yang beragam. Misalnya, studi oleh Wahyudi dan Suyanto (2018) menemukan bahwa efektivitas

pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Sementara itu, penelitian Permadi et al. (2020) menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas pengelolaan keuangan terhadap PAD dapat bervariasi tergantung pada karakteristik daerah dan faktor-faktor kontekstual lainnya. Hasil penelitian Anda yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan mungkin mengindikasikan adanya faktor-faktor unik di Kabupaten Bondowoso yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bondowoso, khususnya yang terkait dengan Dinas Kesehatan, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya hubungan signifikan antara efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan PAD. Mungkin ada variabel moderasi atau mediasi yang belum teridentifikasi, atau mungkin ada lag waktu antara implementasi pengelolaan keuangan yang efektif dan dampaknya terhadap PAD. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali strategi pengelolaan keuangan mereka, terutama dalam konteks optimalisasi sumber-sumber PAD di sektor kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif dengan daerah lain yang berhasil menunjukkan hubungan positif antara efektivitas pengelolaan keuangan dan peningkatan PAD untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi.

8. Pengaruh Teknologi finansial Terhadap Peningkatan PAD Melalui Pengelolaan keuangan daerah

Hasil uji hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa Teknologi Finansial (X_1) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y_2) melalui mediasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1) di Kabupaten Bondowoso. Nilai original sampel positif (0,033) dengan P value 0,431 yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa meskipun ada indikasi pengaruh positif, hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peran teknologi finansial dalam meningkatkan PAD melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum terbukti secara empiris di Kabupaten Bondowoso.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi peran teknologi finansial dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap PAD. Misalnya, studi oleh Nurdin et al. (2019) menemukan bahwa adopsi teknologi finansial dalam sistem pembayaran pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan berpotensi meningkatkan PAD. Sementara itu, penelitian Pratama dan Suaryana (2020) menunjukkan bahwa penerapan teknologi finansial dalam administrasi keuangan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada PAD. Namun, hasil penelitian Anda yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi atau adopsi teknologi finansial di Kabupaten Bondowoso.

Untuk mengoptimalkan peran teknologi finansial dalam peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso, khususnya yang terkait dengan Dinas Kesehatan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi teknologi finansial dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah mungkin perlu mempertimbangkan program pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan adopsi teknologi finansial di kalangan pegawai dan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan studi lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat efektivitas teknologi finansial dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan PAD, serta mengeksplorasi strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

9. Pengaruh Literasi finansial Terhadap Peningkatan PAD Melalui Pengelolaan keuangan daerah

Hasil uji hipotesis kesembilan menunjukkan bahwa Literasi Finansial (X_2) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y_2) melalui mediasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1) di Kabupaten Bondowoso. Nilai original sampel positif (0,049) dengan P value 0,193 yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa meskipun ada indikasi pengaruh positif, hubungan ini tidak signifikan secara

statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peran literasi finansial dalam meningkatkan PAD melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum terbukti secara empiris di Kabupaten Bondowoso.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara literasi finansial, pengelolaan keuangan daerah, dan PAD. Misalnya, studi oleh Handayani dan Novita (2018) menemukan bahwa tingkat literasi finansial masyarakat berkorelasi positif dengan kesadaran membayar pajak daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD. Sementara itu, penelitian Yusuf dan Zulfikar (2020) menunjukkan bahwa literasi finansial aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun dampaknya terhadap PAD tidak langsung terlihat. Hasil penelitian Anda yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan mungkin mengindikasikan adanya faktor-faktor kontekstual di Kabupaten Bondowoso yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Untuk mengoptimalkan peran literasi finansial dalam peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso, khususnya yang terkait dengan Dinas Kesehatan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program peningkatan literasi finansial yang telah dilakukan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain kesesuaian materi literasi finansial dengan kebutuhan lokal, efektivitas metode penyampaian, dan integrasi literasi finansial dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih terpadu dalam meningkatkan literasi finansial, tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi juga di kalangan aparatur pemerintah. Selain itu, perlu dilakukan studi lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat efektivitas literasi finansial dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan PAD, serta mengeksplorasi strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta juga bisa menjadi opsi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program literasi finansial.

10. Pengaruh Inklusi finansial Terhadap Peningkatan PAD Melalui Pengelolaan keuangan daerah

Hasil uji hipotesis kesepuluh menunjukkan bahwa Inklusi Finansial (X_3) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y_2) melalui mediasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1) di Kabupaten Bondowoso. Nilai original sampel positif (0,005) dengan P value 0,431 yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa meskipun ada indikasi pengaruh positif, hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peran inklusi finansial dalam meningkatkan PAD melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum terbukti secara empiris di Kabupaten Bondowoso.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara inklusi finansial, pengelolaan keuangan daerah, dan PAD. Misalnya, studi oleh Sari dan Sukartha (2019) menemukan bahwa peningkatan inklusi finansial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan PAD. Sementara itu, penelitian Kusuma et al. (2021) menunjukkan bahwa inklusi finansial dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meskipun dampaknya terhadap PAD tidak selalu langsung terlihat. Hasil penelitian Anda yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi atau adopsi inklusi finansial di Kabupaten Bondowoso.

Untuk mengoptimalkan peran inklusi finansial dalam peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso, khususnya yang terkait dengan Dinas Kesehatan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program inklusi finansial yang telah dilakukan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain aksesibilitas layanan keuangan, kesesuaian produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat lokal, dan integrasi inklusi finansial dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mungkin perlu mempertimbangkan kerjasama yang lebih erat dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Bondowoso. Selain itu,

perlu dilakukan studi lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat efektivitas inklusi finansial dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan PAD, serta mengeksplorasi strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang manfaat inklusi finansial bagi individu dan daerah juga bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PAD.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Teknologi finansial berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_1 diterima);
2. Literasi finansial berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_2 diterima);
3. Inklusi finansial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_3 ditolak);
4. Teknologi finansial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Peningkatan PAD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_4 ditolak);
5. Literasi finansial berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan PAD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_5 diterima);
6. Inklusi finansial berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan PAD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_6 diterima);
7. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Peningkatan PAD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_7 ditolak);
8. Teknologi finansial terhadap Peningkatan PAD melalui Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_8 ditolak);
9. Literasi finansial terhadap Peningkatan PAD melalui Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_9 ditolak).

10. Inklusi finansial terhadap Peningkatan PAD melalui Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (H_{10} ditolak).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran akan dituliskan sebagai berikut :

1. Bagi ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan semua pernyataan di atas yang menyoroti faktor-faktor seperti Teknologi finansial, Literasi finansial, dan Pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap Peningkatan PAD melalui Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

- a) Perlu peningkatan penggunaan Teknologi Finansial dengan cara memberikan kemudahan dalam mengakses teknologi tersebut.
- b) Perlu peningkatan Literasi Finansial dengan cara peningkatan pengetahuan keuangan.
- c) Perlu peningkatan Inklusi Finansial dengan cara memberikan kemudahan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Perlu peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan dengan cara yang lebih ekonomis untuk menghindari pengeluaran uang, penggunaan barang yang berlebih.
- e) Perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Bagi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Hasil penelitian ini bagi Universitas dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan

keuangan daerah dan peningkatan PAD, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik serupa Kabupaten Bondowoso.

Mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan aspek teknologi finansial, literasi finansial, dan inklusi finansial dalam program studi yang relevan dengan manajemen pemerintahan dan kesehatan publik.

Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Dinas Kesehatan untuk melakukan riset terapan yang dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan PAD..

3. ² Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini bagi peneliti yang lain dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan model penelitian terbaru yang berkaitan dengan Teknologi finansial dan Literasi finansial serta sesuai dengan kebutuhan keilmuan saat ini.

● **35% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 35% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unars.ac.id Internet	10%
2	unars.ac.id Internet	4%
3	repo.darmajaya.ac.id Internet	2%
4	repository.umsu.ac.id Internet	1%
5	eprints.uny.ac.id Internet	1%
6	repository.unibos.ac.id Internet	1%
7	repository.unja.ac.id Internet	1%
8	repo.uinbukittinggi.ac.id Internet	1%
9	dinkes.bondowosokab.go.id Internet	<1%

10	ejournal.unma.ac.id Internet	<1%
11	kompasiana.com Internet	<1%
12	journal.uny.ac.id Internet	<1%
13	jimfeb.ub.ac.id Internet	<1%
14	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	<1%
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
16	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
17	ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id Internet	<1%
18	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
19	risetekonomi.com Internet	<1%
20	stiealwashliyahsibolga.ac.id Internet	<1%
21	repository.stei.ac.id Internet	<1%

22	gramedia.com Internet	<1%
23	jurnal.untirta.ac.id Internet	<1%
24	library.polmed.ac.id Internet	<1%
25	jurnal-umbuton.ac.id Internet	<1%
26	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
27	ojs.unik-kediri.ac.id Internet	<1%
28	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
29	eprints.perbanas.ac.id Internet	<1%
30	repository.uindatokarama.ac.id Internet	<1%
31	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
32	repository.unwira.ac.id Internet	<1%
33	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%

34	docplayer.info Internet	<1%
35	blog.binadarma.ac.id Internet	<1%
36	journal.widyatama.ac.id Internet	<1%
37	repository.umpwr.ac.id:8080 Internet	<1%
38	Johanes Paulus Koromath. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelol..." Crossref	<1%
39	jdih.sukoharjokab.go.id Internet	<1%
40	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
41	jurnal.untan.ac.id Internet	<1%
42	Diah Andari, Nadila Andriana, Citra Mariana. "Pengaruh Profitabilitas D..." Crossref	<1%
43	e-journal.unmas.ac.id Internet	<1%